

**PENGAMBILAN KEMBALI HARTA HIBAH DAN PENYELESAIAN  
HUKUMNYA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF  
( Studi di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran )**

**SKRIPSI**

Dianjukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**HENISA  
NPM. 1621030244**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441H/2019M**

**PENGAMBILAN KEMBALI HARTA HIBAH DAN PENYELESAIAN  
HUKUMNYA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF  
(Studi di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran)**

**SKRIPSI**

Dianjukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**H E N I S A**  
**NPM. 1621030244**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**

**Pembimbing I : Dr.Hj.Zuhraini S.H.,M.H**  
**Pembimbing II : Khoiruddin M.S.I.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441H/2020M**

## ABSTRAK

Hibah adalah pemberian yang bersifat sukarela, itu artinya pihak pemberi harus benar-benar rela melepas harta yang telah dia berikan kepada orang lain tanpa meminta dan mengharap imbalan apapun dan pemberian itu dilakukan pada saat pemberi masih hidup. Praktik hibah ini sudah lama ada ditengah masyarakat, seperti yang terjadi di Pedukuhan Ketepan Desa Padang Cermin dimana dalam praktik hibah tersebut terjadi perselisihan antara pewaris hibah dan penerima hibah sehingga terjadi pengambilan kembali harta hibah oleh pewaris hibah tersebut.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana praktik pengambilan kembali harta hibah di Pedukuhan Ketepan Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang pengambilan kembali harta hibah? dan 3. Bagaimana penyelesaian hukumnya pengambilan kembali harta hibah ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami bagaimana praktik pengambilan kembali harta hibah di Pedukuhan Ketepan Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, mengetahui dan memahami tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang pengambilan kembali harta hibah dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian hukumnya tentang pengambilan kembali harta hibah ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pada tahun 1983 Bapak Abdul Kadir menghibahkan tanahnya seluas 8 x 12 meter kepada masyarakat pedukuhan ketepan untuk didirikan masjid. karena dana tidak cukup, didirikan oleh masyarakat musholla. Selama penghibah hidup tidak ada permasalahan pada tanah yang dihibahkan. Tahun 2004 pemberi hibah meninggal dunia. Pada tahun 2006 masyarakat ingin merenovasi musholla tersebut menjadi masjid dan membutuhkan tanda tangan ahli waris penghibah karena tanah tersebut dihibahkan hanya di atas selembar kertas biasa, tidak tercatat di notaris. Tetapi bapak Samsudin selaku ahli waris tidak mau memberikan tanda tangannya dan mengambil kembali harta hibah tersebut. Mengambil kembali harta hibah dalam hukum Islam haram hukumnya kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya karena mengambil kembali harta hibah sama saja seperti menjilat muntahannya kembali.

Pengambilan kembali harta hibah dan penyelesaian hukumnya dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif yang terjadi di Pedukuhan Ketepan Desa Padang Cermin tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum positifnya harus dilaksanakan di pengadilan untuk memutuskan permasalahan tersebut.

Dalam hukum positif pengambilan kembali harta hibah harus diselesaikan di pengadilan karena saksi dalam penyerahan harta hibah tersebut masih hidup dan tidak bisa mengambil kembali hibah tersebut secara sepihak saja.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Henisa  
NPM : 1621030244  
Jurusan/prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengambilan Kembali Harta Hibah Dan Penyelesaian Hukumnya Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 17 April 2020

Penulis



Henisa

NPM. 1621030244





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung 35131*

*Telp(0721)703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi: Pengambilan Kembali Harta Hibah Dan Penyelesaian Hukumnya  
Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Desa  
Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran)**

**Nama : Henisa  
NPM : 1621030244  
Jurusan : Muamalah  
Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.  
NIP.197009011997031002**

**Pembimbing II**

**Khoiruddin, M.S.I  
NIP. 197807252009121002**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I  
NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : Pengambilan Kembali Harta Hibah Dan Penyelesaian Hukumnya Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran), disusun oleh : Henisa, NPM : 1621030244, Jurusan: Muamalah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syaria'ah.

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

**Ketua** : Eti Karini, S.H.,M.Hum

(.....)

**Sekretaris** : Muslim, S.H.I.,M.H.I

(.....)

**Penguji I** : Dr.H.Khoirul Abror, M.H

(.....)

**Penguji II** : Dr.Hj.Zuhraini, S.H.,M.H

(.....)

**Penguji III** : Khoiruddin, M.S.I

(.....)

**Pembimbing I** : Dr.Hj.Zuhraini, S.H.,M.H

(.....)

**Pembimbing II** : Khoiruddin, M.S.I

(.....)

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syaria'ah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H**  
**NIP. 196210219930310002**



## MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ  
سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan) oleh orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah SWT melipat gandakan (ganjaran) bagi yang Dia hendaki. Dan Allah maha luas (Karunia-Nya) lagi maha mengetahui.

Q.S Al-Baqarah [2] : 261



## **PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Nya, Sebuah karya yang sederhana namun memerlukan banyak pengorbanan dan kerja keras yang tiada tara kupersembahkan kepada orang-orang yang sangat kusayangi sebagai tanda bakti hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga ku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Hasan M.Taher dan Ibu Hasanah yang telah membesarkan, membiayai, dan mendo'akan serta memberi dukungan yang tak terhingga untukku. Semoga kelak aku dapat membalas jasa pengorbanan kalian, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kalian di dunia dan di akhirat.
2. Kakakku tersayang Ira Diani dan Adikku Pandam Kurnia yang selalu memberikan perhatian, dukungan, semangat serta kasih sayang yang tak terhingga.
3. Untuk seluruh keluarga besarku baik yang ada di Pesawaran maupun diluar Pesawaran atas segala dukungan, doa dan kasih sayang serta atas keberhasilanku.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

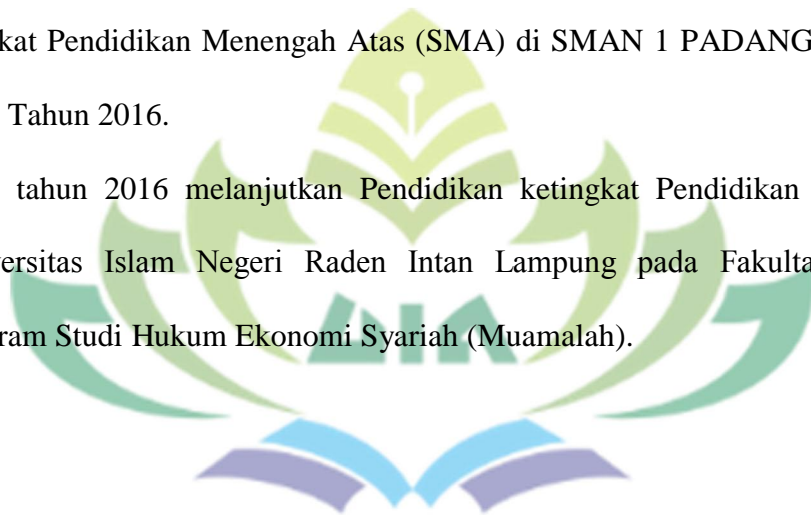


## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap Henisa, dilahirkan di Sanggi Kec.Padang Cermin pada tanggal 17 Juli 1998. Putri ke-2 dari 3 bersaudara, dari pasangan Bapak Hasan M.Taher dan Ibu Hasanah

Riwayat Pendidikan sebagai berikut:

1. Tingkat Pendidikan Dasar (SD) di SDN I DURIAN, lulus Tahun 2010
2. Tingkat Pendidikan Menengah Pertama (SMP) di SMPN 4 PADANG CERMIN, lulus Tahun 2013
3. Tingkat Pendidikan Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 PADANG CERMIN, lulus Tahun 2016.
4. Pada tahun 2016 melanjutkan Pendidikan ketingkat Pendidikan tinggi (SI) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).



## KATA PENGANTAR

*Asallamuallaikum Wr.Wb*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul **“Pengambilan Kembali Harta Hibah dan Penyelesaian Hukumnya Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran)** dapat diselesaikan.

Shalawat serta salam Saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang sangat setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Kepada semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa saya haturkan rasa terimakasih disampaikan kepada :

1. Bapak Prof Dr. H. Moh.Mukri.,M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. Khairuddin, M.H Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku Sekertaris Jurusan Muamalah serta Bapak Muslim,



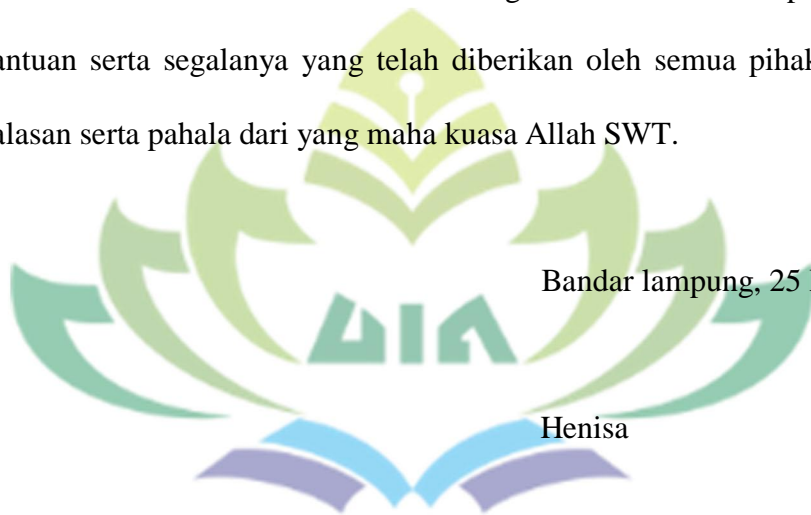
S.H.I.,M.H.I selaku Staf Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.

4. Ibu Dr. Hj. Zuhraeni, S.H.,M.H Dosen Pembimbing I dan Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan memberikan bimbingan serta arahan sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
5. Kepala beserta Staf Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, refrensi yang dibutuhkan.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing juga seluruh Staf Kasubag yang telah banyak membantu menyelesaikan tugas akhirku.
7. Teman-teman Muamalah-E 2016 yang telah mengisi cerita perkuliahan, semoga apapun niat baik kita dilancarkan oleh Allah SWT.
8. Sahabatku Ida Saputi, Jihan Ayu Wulandari, Rani Afrinah, Tanti Aulia) yang selalu mendukung, membantu dan menemani dalam canda tawa selama masa perkuliahan yang telah memberiku banyak pengalaman.
9. Orang-orang terdekatku keluarga Orkes Abangda Herman Parades S.H.,M.H, Najih Mustofa S.H.I.,M.Pd.I, Rosa Septiawan S.E, Hipzoni S.H, Diah Ayu Lestari S.H, Niken Ayu Wulandari S.E serta Riza Rahmayadi dan Firdani terimakasih atas didikan selama ini dan selalu memberiku motivasi.
10. Teman-teman seperjuanganku Indah Veronika, Ayunda, Oci dan Rini Astika Sugino, S.E yang telah banyak memberiku pelajaran hidup.

11. Keluarga besar KKN 144 Penantian Kec.Pulau Panggung Kab.Tanggamus Susi, Cut, Putri, Anisa, Fitri, Eva, Tuti, Faiqoh, Reri, Dimas, Yusuf, Mahfud yang selalu memberikan do'a dan dukungan hingga saat ini komunikasi tetap terjaga.
12. Untuk Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Syariah cabang Bandar Lampung yang telah mengajarkanku banyak hal serta Ilmu yang begitu bermanfaat untuk kehidupanku dan memdidikku menjadi seorang pemimpin dengan merasakan berteman lebih dari saudara. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat balasan serta pahala dari yang maha kuasa Allah SWT.

Bandar lampung, 25 Maret 2020

Henisa





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xii

## BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan Penelitian .....	7
G. Signifikasi Penelitian .....	8
H. Metode Penelitian .....	9

## BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori .....	15
1. Hibah Dalam Hukum Islam.....	15
a. Pengertian Hibah .....	15
b. Dasar Hukum Hibah .....	19
c. Rukun dan Syarat Hibah.....	25
d. Etika Hibah.....	32
e. Macam-Macam Hibah .....	36
f. Hikmah Hibah .....	39
2. Hibah Dalam Hukum positif .....	42
a. Pengertian Hibah .....	42
b. Unsur-Unsur Hibah .....	44
c. Rukun dan Syarat Hibah.....	45
d. Subjek dan Objek Hibah.....	48
e. Cara Memperoleh Hibah .....	51
f. Cara Hapusnya Hibah.....	53
B. Tinjauan Pustaka.....	56

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	59
B. Praktik Pengambilan Kembali Harta Hibah Di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran.....	62

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

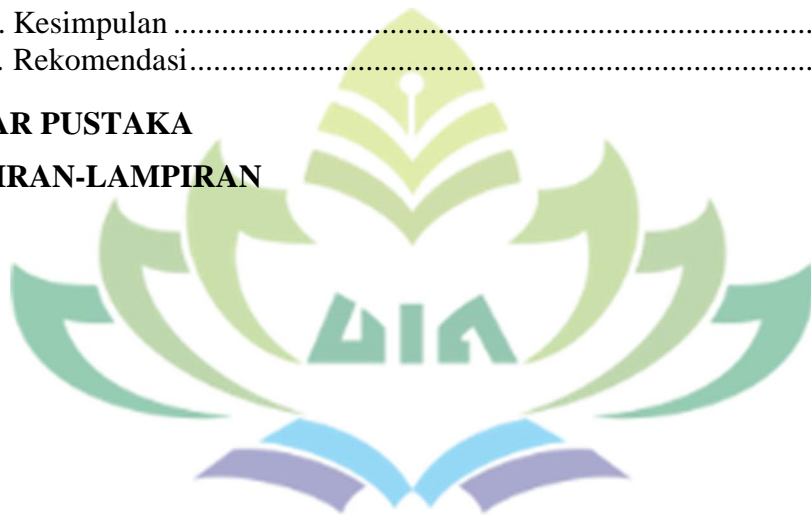
A. Praktik Pengambilan Kembali Harta Hibah Di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran.....	68
B. Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pengambilan Kembali Harta Hibah .....	70
C. Penyelesaian Hukumnya Pengambilan Kembali Harta Hibah Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif .....	74

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Rekomendasi.....	81

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelumnya saya akan menguraikan pembahasan terlebih dahulu, agama menghindari penafsiran yang berbeda dalam mengartikan judul skripsi ini, maka saya akan menjelaskan dengan memberikan arti dari kata-kata yang perlu ditegaskan dalam judul ini. Adapun Judul skripsi ini yaitu **“Pengambilan Kembali Harta Hibah dan Penyelesaian Hukumnya Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran)”**, sebagai berikut:

1. Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.<sup>1</sup> Perpindahan hak milik dalam pandangan hukum Islam salah satunya ialah dengan hibah, dengan menghibahkan suatu benda berarti keluarlah sesuatu itu dari milik *wahib* (yang menghibahkan) dan berpindah kepada *mauhub lah* (yang menerima hibah).<sup>2</sup>
2. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), h.436.

<sup>2</sup>Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.471.

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1470.

3. Hukum Islam adalah suatu perangkat peraturan yang berdasarkan dari wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui berlaku dan mengikat untuk semua umat Islam.<sup>4</sup>
4. Hukum Positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum dan khusus dan ditegakan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas yang dimaksud dengan skripsi ini untuk menyelidiki dan membahas secara lebih mendalam serta mempelajari gambaran secara umum tentang “pengambilan kembali harta hibah dan penyelesaian hukumnya dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif” (studi di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran).

## **B. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan yang menjadi dasar penulisan untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, yaitu :

### **1. Alasan Objektif**

Secara objekif, berdasarkan masalah yang terjadi di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran tentang pengambilan kembali harta hibah yang sudah diberikan kepada masyarakat dan sudah dibangun musholla, hal ini perlu diteliti lebih lanjut dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif.

---

<sup>4</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.42.

<sup>5</sup>I.Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2008), h.56.



## 2. Alasan Subjektif

- a. Pengambilan kembali harta hibah dan penyelesaian hukumnya dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif selain menarik untuk dibahas, juga terdapat sarana yang mendukung dalam penulisan skripsi ini seperti literatur-literatur yang menunjang seperti jurnal, artikel dan data yang diperlukan untuk menunjang referensi kajian data dalam usaha menyelesaikan laporan proposal ini maka sangat memungkinkan untuk melakukan penelitian.
- b. Pembahasan mengenai Pengambilan kembali harta hibah dan penyelesaian hukumnya dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif belum ada di fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- c. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini merupakan salah satu masalah yang termasuk didalam disiplin ilmu yang pelajari di jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'amalah*), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## C. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama *rahmatan lil'alam*, yaitu agama yang bertujuan mengatur segala kehidupan manusia baik kehidupan dunia maupun diakhirat. Islam memberikan petunjuk bagi manusia mengenai bagaimana cara menjalani kehidupan yang benar, tidak hanya terbatas dalam hubungan pribadi antara seorang manusia dengan pencipta-Nya (*hablum minallah*), namun juga

hubungan antara manusia dengan manusia lainnya (*hablum minanas*) termasuk juga dengan alam sekitarnya.<sup>6</sup>

Di dalam agama Islam hibah, hadiah dan wasiat merupakan bagian dari tolong menolong dalam kebaikan. Seseorang diperbolehkan untuk memberikan sebagai harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain. Pemberian tersebut disebut hibah.

Hibah dapat mendekatkan hati dan menguatkan tali cinta antara manusia, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW:

تَهَادُوا تَحَابُّوا<sup>7</sup>

Artinya: Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian saling mencintai. (HR.Bukhori).

Di jelaskan dalam Pasal 1666 ayat (1) KUHPerdara bahwa hibah merupakan “suatu persetujuan dengan mana seseorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang menerima barang itu”.<sup>8</sup> Akan tetapi itu tidak berlaku secara umum, dalam hadis lain Nabi Saw menjelaskan bahwa orang tua boleh menarik kembali pemberian yang telah ia berikan kepada anaknya.

Segala macam harta benda yang dapat dijadikan hak milik dapat dihibahkan, baik harta pusaka maupun harta gono-gini seseorang serta hibah

---

<sup>6</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.2.

<sup>7</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.437.

<sup>8</sup>Salim, *Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman Dan Hibah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.33.

menurut hukum Islam dapat dilakukan baik secara tertulis maupun secara lisan.<sup>9</sup>

Pada dasarnya harta hibah yang sudah diberikan kepada orang lain haram untuk diminta kembali baik hadiah, sadaqah, hibah maupun wasiat. Oleh karena itu para ulama menganggap bahwa meminta barang yang sudah dihadiahkan dianggap sebagai perbuatan yang buruk sekali.<sup>10</sup> Di dalam sebuah hadis orang yang mengambil kembali pemberiannya baik hibah maupun sedekah diibaratkan dengan anjing yang menjilat muntahnya, betapa buruk perumpamaan orang yang mengambil kembali pemberiannya sebagaimana dalam hadis sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَاثِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ (متفق عليه)<sup>11</sup>

Artinya : Dari Ibnu Abbas ra dia berkata: Nabi Saw bersabda: “Orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang muntah kemudian anjing tersebut menjilati muntahannya”. (Muttafaq’Alaih).

Realita yang sering terjadi di masyarakat khususnya di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin ini berbeda dimana *wahib* (pemberi hibah) bapak Abdul Kadir (sekitar pada tahun 1983 memberikan tanahnya kepada masyarakat seluas 8 x 12 meter persegi sebagai *mauhub lah* (penerima hibah) secara lisan dan ada beberapa saksi untuk dibangun sebuah musholla atau

---

<sup>9</sup> Jonaedi Efendi, Isnu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h.176.

<sup>10</sup> Thahir Abdul Mushin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam* (Bandung: Al Ma’arif, 1985), h.218.

<sup>11</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulugh Al Maram Min Adillat Al Ahkam*, (Semarang: Taha Putera, t.th), h.192

masjid karena didusun tersebut belum ada tempat ibadah bersama masyarakat setempat. Sekitar pada tahun 2004 pemberi hibah bapak Abdul Kadir meninggal dunia.

Tahun 2006 bapak Samsudin yang saat ini berusia 60 tahun anak dari bapak Abdul Kadir (alm) sebagai ahli waris, diminta oleh masyarakat untuk menanda tangani surat hibah guna mengajukan proposal dana untuk perbaikan musholla yang direncanakan masyarakat akan diperbesar menjadi masjid, karena pada saat alm bapak Abdul Kadir menghibahkan tanahnya kepada masyarakat tidak secara tertulis (tidak ada akta hibah) beliau menyerahkan secara lisan akan tetapi beliau tidak mau menandatangani surat tersebut.

Sampai pada tahun 2016 masyarakat mengadakan rapat besar yang dihadiri oleh seluruh warga Desa Padang Cermin untuk mencari titik temu pada permasalahan harta hibah tersebut. Dalam rapat yang digelar oleh pengurus musholla dan warga tidak menemukan titik terang sampai sekarang, bapak Samsudin tetap tidak mau menandatangani surat tersebut tanpa alasan. Masyarakat tidak tahu harus mengambil langkah apa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sampai saat ini harta hibah yang sudah diberikan alm bapak Abdul Kadir kepada masyarakat diambil kembali oleh bapak Samsudin anak dari alm bapak Abdul Kadir karena sertifikat tanah tersebut masih ada ditanganyanya.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, saya tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang pengambilan kembali harta hibah dan penyelesaian hukumnya dalam

---

<sup>12</sup>Wawancara, dengan bapak Zahroni, Pengurus Musholla, Tanggal 14 November 2019



tinjauan hukum Islam dan hukum positif (studi di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran ).

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah terhadap pengambilan kembali harta hibah dan penyelesaian hukumnya dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif (studi di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran)

#### **E. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pengambilan kembali harta hibah di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang pengambilan kembali harta hibah?
3. Bagaimana penyelesaian hukumnya pengambilan kembali harta hibah ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami bagaimana praktik pengambilan kembali harta hibah di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran
2. Mengetahui dan memahami tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang pengambilan kembali harta hibah
3. Mengetahui bagaimana penyelesaian hukumnya tentang pengambilan kembali harta hibah ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.

## **G. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu:

### **1. Manfaat teoritis**

penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pengambilan kembali harta hibah dan diharapkan mampu memperluas pemahaman ilmu pengetahuan dalam artian yang membangun.

### **2. Manfaat praktis**

Penelitian ini diharap bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan, khususnya bagi masyarakat di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran tentang praktik pengambilan kembali harta hibah. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum di jurusan *Mu'amalah*, fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field resarch*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya, Karena penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari

lapangan (lokasi penelitian).<sup>13</sup> Dalam hal ini akan langsung mengamati dan meneliti tentang terjadinya pengambilan kembali harta hibah dan penyelesaian hukumnya dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif (studi di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran).

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan atau menggambarkan suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar mudah dipahami dengan apa yang terjadi di lapangan.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini peneliti ingin menggambarkan dan melakukan analisis tentang “Pengambilan kembali harta hibah dan penyelesaian hukumnya dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif”.

## 3. Data dan Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>15</sup> Biasanya melalui angket, wawancara, jajak pendapat dan lain-lain. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari keluarga penghibah, yang mengambil kembali harta hibah dan masyarakat yang menjadi saksi ketika terjadinya

---

<sup>13</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Mondar Maju, 1996), h.32.

<sup>14</sup> Ibid, h.33.

<sup>15</sup> Saiffudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h.91.

akad pemberian hibah di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang berfungsi menjadi pendukung dari masalah dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku dan dokumen penting yang berhubungan dengan pengambilan harta hibah dan penyelesaian hukumnya yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian. Maka penelitian merupakan penelitian populasi. Studi penelitiannya juga disebut studi populasi atau sensus.<sup>16</sup> Populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, yang terdiri dari 1 kepala desa, 1 kepala dusun, 3 orang keluarga si penghibah, 2 orang saksi saat pemberian hibah, 1 orang pengurus musholla, dan 2 orang warga sekitar musholla.

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.102.



## b. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>17</sup> Untuk menentukan ukuran sampel, digunakan rumusan yang di kemukakan oleh Arikunto, yang apabila subjeknya kurang dari 100 orang maka akan diambil semua sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi dan jika subjeknya besar melebihi 100 orang dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%. Karena populasi dalam penelitian ini berjumlah kurang dari 100, yaitu 10 orang, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah 10 orang. Dengan demikian, karena keseluruhan populasi dijadikan sampel maka penelitian ini adalah penelitian populasi.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan ini, penyusun menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data, yaitu:

### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis dalam terhadap gejala-gejala yang diteliti<sup>18</sup> Peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Teknik observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku penelitian. Tetapi tidak semua harus diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang terkait atau yang relevan

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, h.108.

<sup>18</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*, (Bandung: Mondar Maju, 1996), h.157.

dengan data-data yang dibutuhkan. Tugas dari penelitian kualitatif adalah mengamati ruang atau tempat untuk dicatat atau digambar. Dalam penelitian ini mengamati langsung pengambilan kembali harta hibah dan penyelesaian hukumnya dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif (studidi Dusun Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran).

b. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih saling berhadap-hadapan secara fisik yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu.<sup>19</sup> Penelitian ini menggunakan wawancara secara bebas yaitu dengan menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan dan yang berkaitan dengan permasalahan. Wawancara yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui fakta-fakta atau keterangan dari para warga, keluarga dan pengurus musholla di Desa.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana warga masyarakat menjadi objek penelitian untuk pengambilan kembali harta hibah dan penyelesaian hukumnya dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif (studidi Dusun Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran).

---

<sup>19</sup> Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta : UNS,2006), h.72

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data, mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berbentuk catatan, gambar, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi ini dilakukan di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran.

## 6. Pengolahan Data

Setelah data-data yang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian data tersebut diolah dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengoreksi data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau data yang terkumpul tidak logis dan meragukan.
- b. Sistematika data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>20</sup>
- c. Pentabelan (*tabulating*) yaitu proses penepatan data dalam bentuk tabel dengan cara membuat tabel dengan berisikan data sesuai dengan kebutuhan analisis.

## 7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. Di mana penelitian kualitatif adalah penelitian yang berisi pandangan atau keyakinan bahwa fokus penelitian adalah kualitas makna-*meanings* (hakikat dan esensi). Juga metode berfikir deduktif adalah

---

<sup>20</sup>Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h.107.

metode analisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut, kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat khusus.





## BAB II LANDASAN TEORI

### A. KAJIAN TEORI

#### 1. Hibah Dalam Hukum Islam

##### a. Pengertian Hibah

Kata hibah adalah bentuk *masdar* dari kata *wahabah* artinya memberi, yang berarti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau dengan kata lain kesadaran untuk melakukan kebaikan atau diambil dari kata *hubub ar-rih* (angin yang menghembus).<sup>21</sup>

Dikatakan dalam kitab *Al-Fath*, diartikan dengan makna yang lebih umum berupa *ibra* (membebaskan utang orang), hibah dipakai untuk menyebutkan makna yang lebih khusus dari pada sesuatu yang mengharap ganti dan dengan ini sangat tepat dengan ucapan orang yang mengatakan hibah adalah pemberian hak milik tanpa ganti rugi.<sup>22</sup>

Hibah menurut istilah adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (*aqad*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.<sup>23</sup>

Hibah menurut terminologi syara' adalah pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap satu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> A.W.Munawir, *Kamus Al-Munawir*, Cet.14, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h.1584.

<sup>22</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet.III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h.466.

<sup>23</sup> *Ibid* h.467.

<sup>24</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat System Transaksi Dalam Islam*, Ed.1, cet.1, (Jakarta: Amzah, 2010), h.435.

Pengertian hibah dalam esiklopedia hukum Islam adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun.<sup>25</sup> Penghibahan termasuk suatu perjanjian sepihak, dimana hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban atas perjanjian itu, yaitu si penghibah, sedangkan si penerima hibah sama sekali tidak mempunyai kewajiban.<sup>26</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 171 huruf g), hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>27</sup>

Dalam beberapa pengertian diatas hibah yang berarti pemberian maka itu artinya pihak pemberi harus benar-benar rela melepas harta yang telah dia berikan kepada orang lain tanpa meminta dan mengharap imbalan apapun.

Hibah bertujuan untuk saling menguatkan ikatan batin antara sesama manusia sebagaimana disyariatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

تَصَافَحُوا يَذْهَبُ الْغِلُّ ، وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا ، وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ (رَوَاهُ مَا لِكْ)<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Esiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 1996), h.540.

<sup>26</sup> Azni, “Eksistensi Hibah Dan Posibilitas Pembatalannyadalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.40, h.4, No.2 Juli – Agustus 2015, Tersedia di <https://www.google.com/search?q=jurnal+tentang+hibah&oq=jurnal+tentang+hibah&aqs=Chrom e..69i57j017.4464j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> (Diakses Pada Tanggal 12 Februari 2020 pukul 08.00 WIB)

<sup>27</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), h.56

<sup>28</sup> Romdoni Muslim, *300 Hadits Akhlak*, Hadits Ke-45, (Jakarta: Restu Illahi, 2004), h.45

Artinya: “Saling bersalamanlah (berjabat tanganlah) kalian, maka akan hilanglah kedengkian (dendam). Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai dan akan hilang kebencian.” (HR. Malik dalam *Al-Muwatha*’, 2/ 908/ 16.

Dalam Al-Qur’an terdapat banyak ayat yang menganjurkan agar saling memberi terhadap sesama manusia diantaranya dalam surah Al-Munafiqun [63]: 10

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ (المنافقون ١٠: ٢٩)

Artinya: “Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang diantara kamu: lalu ia berkata: ”Ya Rabb-ku mengapa engkau tidak menangguhkan (kematian) ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?”

Menurut mazhab Syafi’i hibah ialah pemberian yang sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qabul diwaktu orang yang memberikan hibah masih hidup. Pemberian tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari Allah atau karena untuk menutup kebutuhan orang yang diberikannya.<sup>30</sup> Dengan demikian menurut mazhab Syafi’i hibah tersebut mengandung dua pengertian yaitu yang pertama pengertian khusus sebagaimana definisinya telah diuraikan diatas, yang

---

<sup>29</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Jakarta: 1971), h.938

<sup>30</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.117.

kedua pengertian umum, yaitu hibah dalam arti umum mencakup hibah dan sedekah.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami adanya tiga unsur yang terdapat dalam pengertian hibah, yaitu:

- 1) Adanya pemindahan kepemilikan
- 2) Pemindahan kepemilikan tersebut terjadi saat kedua belah pihak masih hidup
- 3) Tidak adanya ganti rugi dalam pemindahan tersebut.<sup>31</sup>

Dalam Pengertian hibah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama :

- 1) Abd al-Rahman al-Jaziri dalam kitab al-fiqih 'ala al-Mazahib al-Arba'ah.<sup>32</sup> Menghimpun empat definisi hibah dari empat mazhab yaitu mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi dan juga bisa disebut hadiah. Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.
- 2) Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan ulama mazhab Hambali. Ulama mazhab Hamblai mendefinisikannya sebagai pemilik harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan

---

<sup>31</sup> Kasuwi Saiban, *Hukum Waris Islam*, (Malang: Um Press, 2007), h.70.

<sup>32</sup> Abd Al-Rahman Al-Jaziri dalam *Kitab Al-Fiqih 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, T.Th.), H.289-292.



orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan bisa diserahkan.<sup>33</sup>

3) Menurut Teungku Muhammad Hasbue Ash-Shiddieqy hibah ialah mengalihkan hak milik kepada orang lain secara cuma-cuma tanpa adanya bayaran.<sup>34</sup>

4) Menurut As Shan'ani dalam kitab Subulussalam yang diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad mengatakan bahwa hibah adalah pemilik harta dengan akad tanpa mengharapkan pengganti tertentu pada masa hidup.<sup>35</sup>

5) Definisi dari Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi, hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas.<sup>36</sup>

6) Menurut M.Ali Hasan hibah adalah pemberian atau hadiah yaitu suatu pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah tanpa mengharapkan balasan suatu apa pun.<sup>37</sup>

## **b. Dasar Hukum Hibah**

Hibah hukumnya *mandub* (dianjurkan) sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. Bahwasanya Nabi Saw bersabda:

---

<sup>33</sup> Ibid, h.294.

<sup>34</sup> Teungku Muhammad Hasbie Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet.4, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h.98.

<sup>35</sup> Abu Bakar Muhammad, *Subulussalam Terjemah*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), h.319.

<sup>36</sup> Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Semarang: Pustaka Alawiyah, t.th), h.39.

<sup>37</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet.1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.76.

تَهَادَوْا تَحَابُّو<sup>٣٨</sup>

Artinya: Saling memberi hadiahlah kalian niscaya kalian akan saling mencintai.

Dasar hukum hibah dapat kita pedomani dalam hadis Nabi Muhammad SAW antara lain hadis yang diwayatkan oleh Ahmad bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda :

مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ ، وَلَا إِشْرَافٍ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ ، وَلَا يَرُدَّهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَخَلَّ إِلَيْهِ (رَوَاهُ أَحْمَد)<sup>٣٩</sup>

Artinya: “Barang siapa mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan mengharap-harapkan dan meminta-minta, maka hendaklah ia menerimanya dan tidak menolaknya, karena ia adalah rezeki yang diberi Allah kepadanya”. (HR.Ahmad No 2251).

Hadis lain yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum hibah ini adalah yang artinya berbunyi sebagai berikut :

يَا نِسَاءَ السَّلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِحَا رَتِّهَا وَلَوْ فَرَسَنَ شَاةٍ<sup>٤٠</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah, bersabda Nabi SAW: ”Saling memberi hadiahlah kamu karena hadiah itu menghilangkan kebencian hati dan janganlah seorang tetangga perempuan meremehkan hadiah dari tetangganya sekalipun hadiah itu sepotong kaki kambing”. (Sayyiq Sabiq, 14, 1998 : 169).

Dari hadis-hadis yang dikemukakan diatas, dapat di pahami bahwa setiap pemberian dari seseorang hendaklah jangan ditolak, meskipun pemberian tersebut tidak seberapa harganya, selain itu pemberian hadiah dapat menghilangkan kebencian antara sesama khususnya antara pemberi

<sup>38</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.437.

<sup>39</sup> Imam Malik Bin Anas, *Kitab Al-Musnad*, (Kairo Mesir: Darul Hadis, 1995), h.35.

<sup>40</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.113.

dan penerima, dengan kata lain pemberian tersebut akan dapat melahirkan ukhwah Islamiyah antara sesama umat manusia.<sup>41</sup>

Adapun dasar hukum hibah adalah al-qur'an dan hadis Rasulullah SAW, yakni :

1) Al-Qur'an

a) Surah *An-nisa* (4) ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (النساء: ٤)<sup>42</sup>

Artinya : Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka terimalah pemberian itu dengan senang hati.

b) Q.S Al-Baqarah (2) ayat 177 :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآلَمَتِيبِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ

<sup>41</sup> Ibid, h.114

<sup>42</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Al-Huda, 2002), h.115

وَحِينَ الْبَاسِ <sup>ط</sup> أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا <sup>ط</sup> وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

(البقرة: ١٧٧) <sup>٤٣</sup>

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

c) Surah Ali Imran Ayat 38

هَٰذَا لَكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ <sup>ط</sup> قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً <sup>ط</sup> إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (آل عمران: ٣٨) <sup>٤٤</sup>

Artinya: Disanalah Zakariah berdo'a pada kepada tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya engkau maha pendengar do'a".

d) Surah Al-Baqarah (2) ayat 282 dan 283 <sup>45</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ <sup>ع</sup> وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ <sup>ع</sup> وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ <sup>ع</sup> فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

<sup>43</sup> Ibid, h.43

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul'alr*, (Bandung: Art, 1997), h.56.

<sup>45</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.139.

وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(البقرة: ٢٨٢) <sup>٤٦</sup>

Artinya: Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika orang yang berhutang itu orang yang lemah akal atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seseorang lupa maka yang seorang mengingatkan. Janglah saksi-saksi itu enggan

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1985), h.71



(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu baik kecil maupun besar sampai batas waktu pembayarannya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan. (tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah menulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian) maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarkanmu dan Allah mengetahui segala sesuatu.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَفْنِ  
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا  
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٨٢) <sup>٤٧</sup>

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksiannya. Dan barang siapa yang menyembunyikannya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Sesuai dengan anjuran Al-qu'an Surah Al-Baqarah [2] ayat 282 dan 283 diatas bahwa hibah pada dasarnya dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat, namun untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaan dilakukan secara tertulis.

---

<sup>47</sup> Ibid, h.72

e) Surah Al-Munafiqun ayat 10

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ (المنافقون: ١٠)<sup>٤٨</sup>

Artinya: Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang diantara kamu”.

2) As-Sunah

a) Sebuah Hadis yang berbunyi:

عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة هـا دوا كآبوا (رَوَاهُ مَا لِكُ)<sup>٤٩</sup>

Artinya: “Dari Abi Huraira r.a Abdullah Ibn Umar, dan Siti Aisyah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: “saling memberi hadiahlah kamu semua (maka) kamu akan saling mencintai.” (HR.Imam Malik).

Dan hadis yang berbunyi:

بَا نِسَاء الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ خَارَةً لِحَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسٍ شَاةٍ<sup>٥٠</sup>

Artinya: “Dari Abi Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: “janganlah menghina seseorang tetangga yang memberi hadiah walaupun hanya kuku kambing.” (HR Bukhairi, Muslim, Tirmidzi).

c. Rukun dan Syarat Hibah

1) Rukun Hibah

Rukun hibah ada tiga ,yaitu :

a) Kedua belah pihak yang berakad (*Aqidain*)

Barang yang dihibahkan harus harus hak milik si pemberi hibah dan mempunyai kebebasan mutlak untuk berbuat terhadap

<sup>48</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Quran Dan Terjemah, (Jakarta:1971), h.938

<sup>49</sup> Muhammad Bin Isma'il Al-Amir Ash-Shan'ani, Subul As-Salam Syarah Blughul Maram, Terj.Muhammad Isn'an, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*, Cet.8, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), h.555

<sup>50</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, Edisi 1, (Jakarta: Kencana, 2012), h.341.

hartanya. Oleh karena itu hibah tidak sah jika dilakukan oleh seorang wali dalam harta orang yang dicabut kelayakannya, dan disyaratkan untuk penerimaan hibah agar memiliki kelayakan memiliki terhadap apa yang diberikan kepadanya berupa *taklif* (beban), sahnya tindakan atau pengelolaan, dan akan kita jelaskan juga bahwa orang yang belum *mukallaf* juga di terima oleh walinya, maka tidak sah untuk bayi dalam perut atau untuk hewan.

b) *Shighat* (ucapan)

Yaitu *ijab* dan *qabul* berupa ucapan dari orang yang bias berbicara termasuk *ijab* yang jelas jika dia mengatakan: “Saya hibahkan kepadamu, saya berikan kepadamu, saya jadikan milikmu tanpa bayaran,” dan termasuk *qabul* yang jelas seperti ucapnya “Saya terima, saya ridha,” *qabul* tidak sah kecuali jika langsung dan Abu Abbas berkata, boleh ada sepanjang waktu dan pendapat yang benar adalah pendapat pertama karena ia adalah pemberian hak milik, pada saat masih hidup, maka *qabul*-nya juga harus segera sama seperti akad jual beli.

c) Barang yang dihibahkan (*Al-Mauhub bih*)

Kriterianya adalah setiap benda yang boleh di perjual belikan boleh dihibahkan, karena dia adalah akad yang bertujuan mendapatkan hak milik terhadap satu barang, maka dia bias memiliki sesuatu yang bias dimilikinya dengan cara jual beli, sehingga setiap boleh dijual boleh dihibahkan sebagiannya walaupun barang itu banyak.

Segala macam barang bergerak atau tidak bergerak bahkan manfaat atau hasil dari suatu barang tersebut.<sup>51</sup>

## 2) Syarat Hibah

Hibah menghendaki adanya wahib (penghibah), Mauhub lah (penerima hibah) dan mauhub (sesuatu yang dihibahkan)

Adapun syarat hibah yang harus dipenuhi agar hibah sah adalah:

### a) Pemberi *Al-Wahib*

Wahib adalah pemberi hibah yang menghibahkan barang miliknya.

Syarat-syarat bagi penghibah ialah :

- (1) Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah, dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain.
- (2) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan.
- (3) Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal)
- (4) Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah.

Inisiatif pemberi hibah itu harus datang atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan tanpa ada paksaan dari pihak lain, karena ada salah satu prinsip utama dalam transaksi dibidang keharta bendaan, orang yang dipaksa menghibahkan sesuatu miliknya bukan dengan ikhtiar sudah pasti perbuatan itu tidak sah.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat System Transaksi Dalam Islam*, Ed.1, cet.1, (Jakarta: Amzah, 2010), h.442.

<sup>52</sup> Hilmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.77.

Adapun yang berkaitan dengan orang yang sedang sakit dan bangkrut para ulama berselisih paham terhadap masalah ini.<sup>53</sup> Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) di Indonesia ketentuan tentang pemberi hibah yang sedang sakit mendekati kematian yang harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.<sup>54</sup>

b) *Mauhub Lahu* (Penerima Hibah)

Mauhub lahu adalah penerima hibah, diisyaratkan sudah wujud ketika akad hibah dilakukan. Apabila tidak ada secara nyata atau hanya ada atas dasar perkiraan, seperti janin yang masih dalam kandungan ibunya.

Syarat-syarat *mauhub lahu* (penerima hibah) ialah :

- (1) Benar-benar ada;
- (2) Harta yang bernilai;
- (3) Dapat dimiliki zatnya, yaitu bahwa yang dihibahkan itu adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid atau pesantren-pesantren.
- (4) Tidak berhubungan tempat milik penghibah seperti penghibahan tanaman, pepohonan, dan bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang dihibahkan itu wajib dipisahkan dan

---

<sup>53</sup> Ibnu Rusyid, *Bidayah Al-Mujtahid*, Jilid II 245

<sup>54</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h.10



diserahkan kepada yang diberi hiba sehingga dapat menjadi milik baginya.

- (5) Dikhususkan yaitu dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan (dikhususkan) seperti halnya jaminan. Imam Malik Asy-Syafi'i Ahmad dan Abu Tsaur berkata: "Sesungguhnya hibah untuk umum yang tidak dibagi-bagi itu sah".<sup>55</sup>

Bagi golongan maliki, boleh menghibahkan apa yang tidak sah dijual seperti unta liar, buah yang belum nampak hasilnya, dan barang hasil qhashab.<sup>56</sup>

c) Mauhub (barang yang dihibahkan)

Mauhub adalah benar-benar kepemilikannya, ini menurut pendapat Lordships dari Privy Council telah mengemukakan dan menyetujui pendapat Ameer Ali yang menyatakan bahwa barang yang akan diberikan tersebut kepemilikannya.<sup>57</sup> Barang yang dihibahkan menyangkut benda yang dihibahkan haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- (1) Milik sempurna wahid
- (2) Benda tersebut benar-benar ada
- (3) Benda tersebut mempunyai nilai

---

<sup>55</sup> *Ibid*, h.12

<sup>56</sup> AS-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 14, Cet.9, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h.172.

<sup>57</sup> Asaf A.A Fyzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam II*, (Jakarta: Tinta Mas, 1966), h.3

Benda yang memiliki nilai yang jelas, tidak terkait dengan harta pemberi hibah. Barang yang dihibahkan hendaknya sah diperjual belikan. Oleh karena itu tidak sah menghibahkan barang yang tidak diketahui dan tidak boleh diperjual belikan. Berbeda dengan menghadiahkan dan menyedekahkan, keduanya dianggap sah sekalipun keberadaan objeknya masih misteri bagi penerimannya. Dianggap sah menghibahkan sesuatu yang masih menyatu dengan milik orang lain dalam ikatan perseroan. Diperbolehkan pula memperjual belikannya sekalipun sebelum dilakukan pembagian tanpa memandang apakah dia dihibahkan kepada teman seperseroannya atau kepada orang lain.<sup>58</sup>

(4) Benda tersebut dapat di miliki zatnya, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat dialihkan

(5) Berupa barang yang boleh dimiliki menurut agama

(6) Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.<sup>59</sup>

#### d) Ijab Qabul

Ijab qabul adalah penyerahan, misalnya si penerima hibah menyatakan “saya hibahkan atau kuberikan tanah ini kepadamu” lalu si penerima menjawab “Ya saya terima pemberian saudara”.

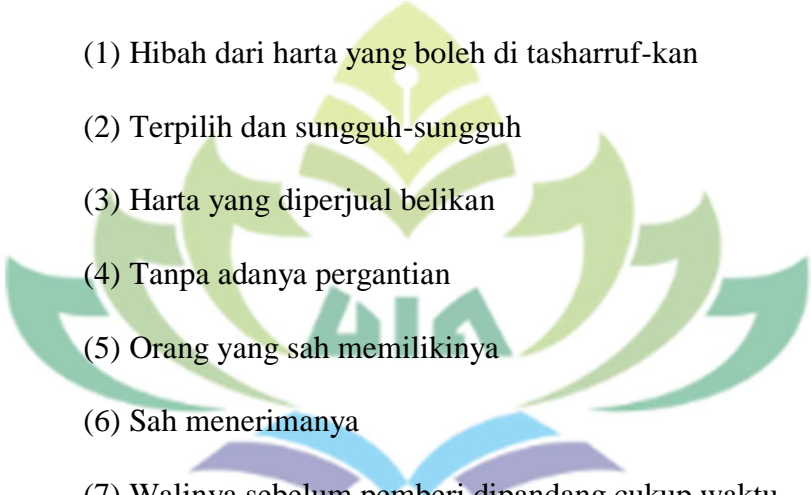
---

<sup>58</sup> Siah Khosyi'ah , *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*, Cet.ke-II, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h.243-244.

<sup>59</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.115.

Selain itu hibah pada dasarnya pemberian yang tidak ada kaitannya dengan kewarisan kecuali kalau ternyata bahwa hibah itu akan mempengaruhi kepentingan dan hak-hak ahli waris. Dalam hal demikian, perlu ada batas maksimal hibah. Tidak melebihi 1/3 harta seseorang, selaras dengan batas wasiat yang tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan.<sup>60</sup>

Sedangkan ulama hanabilah menetapkan 11 (sebelas) syarat hibah yang berkaitan dengan syarat *wahib* dan *mauhub* adalah sebagai berikut :

- 
- (1) Hibah dari harta yang boleh di tasharruf-kan
  - (2) Terpilih dan sungguh-sungguh
  - (3) Harta yang diperjual belikan
  - (4) Tanpa adanya pergantian
  - (5) Orang yang sah memilikinya
  - (6) Sah menerimanya
  - (7) Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu
  - (8) Menyempurnakan pemberian
  - (9) Tidak disertai syarat dan waktu
  - (10) Pemberi sudah dipandang mampu tasharruf (merdeka, mukallaf dan rasyid)
  - (11) *Mauhub* harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.139.

<sup>61</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), h.246.

#### d. Etika Hibah

Umat Islam dilarang menyakiti orang lain baik secara fisik ataupun fisikis maupun terhadap non muslim. Kebaikan orang lain untuk memberikan sejumlah hartanya kepada orang lain harus disambut baik dan untuk menjaga keharmonisan hidup sesama manusia karena hal itu juga telah melakukan syiar Islam secara tidak langsung hal ini juga menciptakan rasa saling tolong-menolong dan bukan untuk saling menyakiti. Firman Allah SWT :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. <sup>62</sup>

Dalam hal hibah meskipun penerima tidak menyukai pemberian dari orang lain dan pemberian itu didasari oleh rasa ikhlas maka secara umum penerima diharuskan untuk menerimanya. Karena dengan menerima harta pemberian dari orang lain itu akan membuat hati si pemberi bahagia dan memberikan sebuah rasa saling menghormati antar sesama manusia.

Jika dalam pemberian terjadi penolakan, penolakan tersebut hendaknya dilakukan dengan cara yang halus dan sopan karena dikhawatirkan jika menolak dengan cara yang kasar akan menyinggung

---

<sup>62</sup> Al-Imam Zainudin Ahmad Bin Abd Al-Lathif Az-Zabidi, *Mukhtshar Shahih Al-Bukhari Al-Musamma*, Terj. Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.432

perasaan si pemberi hibah. Si penerima hibah juga harus mengerti dan tidak merasa kecewa atau merasa direndahkan karena setiap manusia memiliki keinginan yang berbeda-beda dan karakter yang berbeda-beda pula, tidak semua kenyataan dan keinginan memiliki kesamaan oleh karena itu semua ini hal yang sangat wajar dalam hidup bermasyarakat.<sup>63</sup>

Rasulullah SAW telah memberikan ketentuan kepada umat manusia mengenai tata cara menolak pemberian dari orang lain dengan cara yang halus dan sopan, adapun cara-cara menolak pemberian dari orang lain menurut Rasulullah SAW adalah sebagai berikut:

1) Hindari menolak pemberian atau permintaan dari orang lain

Hal ini didasarkan pada hadis nabi yang berbunyi:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرُدُّ الطَّيِّبَ (رواه البخاري)

Artinya: “Diriwayatkan dari Annas r., dia berkata Nabi SAW bersabda: tidak pernah menolak hibah berupa wewangian. (H.R. Al-Bukhori).<sup>64</sup>

2) Niat baik dalam menolak

Jika memang terpaksa menolak pemberian orang lain maka haruslah dilakukan dengan niat dan cara yang baik. Hal ini didasarkan pada hadis nabi yakni:

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَالُ بِالنِّيَّاتِ إِنَّمَالُ كُلِّ أَمْرٍ عَمَانَوَى (رواه البخاري)

<sup>63</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.241

<sup>64</sup> Al-Imam Zainudin Ahmad bin Abd Al-Lathif Az-Zabidi, Mukhtashar *Shahih Al-Bukhari*, (Riadh Saudi Arabia: Daar As-Salam, 1996), h.536



Artinya: “Dari Amirul Mu’minin yakni Abu Hafsh Umar bin Al Khotob r.a dia berkata: Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya sahnya amalan-amalan itu hanya dengan niat dan sesungguhnya bagi setiap seorang apa yang menjadi niatnya.” (H.R.Bukhori) <sup>65</sup>

3) Menolak dengan sikap dan perkataan yang lembut

Seseorang muslim tidak boleh berlaku kasar terhadap saudaranya, tetapi harus bersikap lemah lembut, penuh cinta dan kasih yang tulus. <sup>66</sup>

4) Niat baik dalam menolak

Jika memang terpaksa menolak pemberian orang lain maka haruslah dilakukan dengan niat dan cara yang baik agar tidak menimbulkan ketersinggungan oleh pemberi.

5) Menyampaikan alasan dalam menolak

Jika memang harus menolak pemberian orang lain sampaikanlah penolakan tersebut dengan alasan yang masuk akal karena sering menimbulkan perpecahan dalam umat Islam karena menolak pemberian dengan cara yang kasar dan bernada melecehkan. <sup>67</sup>

6) Penolakan tidak bertentangan dengan syariat

Ketika ada permintaan atau pemberian yang mana itu melanggar syariat dalam Islam maka haruslah ditolak, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT QS Al-Asr ayat 2-3, sebagai berikut:

---

<sup>65</sup> Imam Nawawi, *Hadis Arba'in Nawawi*, Terjemahan Abdul Murhaimin As'ad, (Surabaya: Ar-Rohman, TT), h.163.

<sup>66</sup> Herryanto Al-Fandi, *Etika Bermuamalah Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Amzah, 2011), h.163.

<sup>67</sup> Ibid.h.164

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢٨﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٢٩﴾ (العصر: ٢-٣)<sup>٦٨</sup>

Artinya: (2) sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian (3) kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

#### 7) Memperhatikan tingkat ilmu lawan bicara

Dengan memperhatikan lawan bicara maka penolakan akan dapat dilaksanakan dengan mudah, hal ini sangat perlu kita perhatikan, akan tetapi jika tidak memperhatikan hal tersebut maka dikhawatirkan akan menimbulkan kesalah-pahaman terhadap pemberian tersebut serta memberi kesan buruk terhadap pihak yang menolaknya.

#### 8) Menghindari perdebatan

Islam telah melarang umatnya untuk berdebat, terlebih jika dilakukan untuk mempertahankan pendapat yang tidak benar. Hal ini bukan tanpa alasan karena Allah SWT telah berfirman dalam QS An-Nisa ayat 107

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ

خَوَّانًا أَثِيمًا (النساء: ١٠٧)<sup>٦٩</sup>

Artinya: Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Atidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa.

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Islam, 2009), h.934

<sup>69</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Al-Huda, 2002), h.210

Akan tetapi jika perdebatan itu untuk membeli kebenaran dan tak dapat terelakkan, maka harus dilakukan dengan cara yang halus, baik dan santun. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْ لَهُمُ الْبَلَّتِي هِيَ  
أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ  
بِالْمُهْتَدِينَ (النحل: ١٢٥)<sup>٧٠</sup>

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan buatlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

#### e. Macam-Macam Hibah

Hibah jika dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu (1) hibah *umri*, (2) hibah *ruqba*, (3) hibah *bil-iwadh*, (4) hibah *bisysyarth al-iwadh*. Hibah manfaat yaitu hibah yang berjangka waktu (*umri*).<sup>71</sup> Hal ini disamakan dengan *ariyah* (pinjaman). Menurut bahasa *ariyah* mempunyai arti memberi manfaat tanpa imbalan. Sedangkan *ariyah* (meminjam) menurut syara' adalah memberi manfaat dari sesuatu yang halal dimanfaatkan kepada orang lain, dengan tidak merusak zatnya, agar zat barang itu nantinya bisa dikembalikan lagi

<sup>70</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Semarang: PT Karya Toha Putra, tt), h.401

<sup>71</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.139.

kepada yang empunya,<sup>72</sup> dan ada juga yang disyaratkan seumur hidup orang yang diberi atau disebut juga dengan hibah umri.<sup>73</sup>

#### 1) Hibah *Umri*

Hibah *Umri* artinya umur, pemberian dengan *umri* merupakan salah satu warisan budaya orang-orang Arab Jahiliyah. Disebut demikian karena orang Jahiliyah jika memberikan sesuatu kepada orang lain, maka akan berkata kepadanya saya berikan *umri* ini kepadamu, artinya saya mubahkan untukmu selama umurmu dan hidupmu.<sup>74</sup> Hal ini disamakan dengan ariyah (pinjam meminjam), sehingga Qabdhu (objek hibah) hanya berlaku jika si penerima hibah masih hidup dan harus dikembalikan oleh ahli waris jika si penerima telah meninggal.

Sebaliknya, hibah tidak sah jika dibarengi dengan pembatasan waktu selain masalah *umri* dan *ruqbi*. Jika penghibah membatasi dengan usia penerima hibah, misalnya dikatakan “aku hibahkan kepadamu barang ini seumur hidupmu” atau “sepanjang kamu masih hidup” maka hibahnya sah, sekalipun penghibah tidak mengatakan “apabila aku mati, maka hibah tersebut buat ahli warismu”. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari jabir radiyallahu anhu Rasulullah Saw bersabda: Telah memberitakan pada kami “Nabi Saw Abu Nu’aim, telah memberitakan pada kami Syaiban dari Yahya dari Salamah dari jabir Radiayallu anhu, ia

---

<sup>72</sup> Ansori Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986), h.510.

<sup>73</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 14, Cet.9, (Bandung: Al-Ma’arif, 1997), h.187.

<sup>74</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.459.

berkata: “telah menghukum dengan *umra*, bahwa sesungguhnya *umra* adalah milik orang yang diberinya.

## 2) Hibah *Ruqbi*

Hibah *ruqbi* termasuk hibah yang biasa dilaksanakan pada masyarakat Arab sebelum Islam, kemudian hibah ini diberlakukan kembali pada masa Rasulullah Saw dengan sabdanya “Telah memberitakan pada kami Ahmad bin Hanbal, telah memberitakan pada kami Husyaim, telah memberitakan pada kami Dawud dari Abi Zubair dari jabir berkata: Rasulullah Saw telah bersabda “Dari Jabir r.a Nabi Saw bersabda, “ *umra* itu boleh dilakukan bagi orang yang sanggup melakukannya, dan *ruqbi* juga dilakukan bagi orang yang sanggup melakukannya”.

Hibah *Ruqbi* adalah (hibah bersyarat) yang akan memiliki kejelasan hukum jika pemberi atau penerima telah meninggal salah satunya. Misalnya seseorang yang memeberikan hibah berkata, “jika engkau mati sebelumku, pemberian itu tetap kembali kepadaku.”<sup>75</sup>

Hibah yang dilakukan melalui persyaratan , jika syarat itu ada, barang tersebut dihibahkan bagi yang menerima hibah, tetapi jika syarat itu tidak ada barang yang dihibahkan menjadi milik penghibah.<sup>76</sup>

Akan tetapi hibah tidak sah apabila digantungkan dengan sesuatu yang tidak jelas, misalnya: apabila awal bulan Ramadhan tiba,

---

<sup>75</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.215.

<sup>76</sup> Siah Khosyi’ah, *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*, Cet.ke-II, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h.247.



barang itu aku hibahkan kepadamu.” Atau “bila datang permulaan Ramadhan, maka aku membebaskanmu (dari tanggungan utangmu)”.

#### **f. Hikmah Hibah**

Hikmah disyariatkannya hibah (pemberian) sangat besar karena itu bisa menghilangkan rasa dengki dan menyatukan hati dalam cinta kasih dan sayang menyayangi. Bagi si penghibah, hibah juga bisa menghindari dari sifat kikir atau bakhil dan membentuk sifat dermawan serta mendatangkan manfaat yang begitu besar untuk si pemberi yakni akan dilapangkannya rezeki dan memudahkan urusannya.<sup>77</sup>

Hibah menunjukkan kemuliaan akhlak, kesucian tabi'at, adanya sifat-sifat yang tinggi, himmah, keutamaan dan kemuliaan. Oleh karena itu Rasulullah bersabda :

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( تَهَا  
دُوا , فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسْلُ السَّخِيمَةَ ) رَوَاهُ الْبُزَّارُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a dan Nabi SAW beliau bersabda: saling berhadiahlah kamu sekalian karena sesungguhnya hadiah bisa menghilangkan kedengkian di dalam dada”.<sup>78</sup>

Allah yang maha bijaksana mengetahui bahwa jiwa-jiwa itu ada yang mempunyai sifat kikir dan bakhil, maka dari pada itu Allah mencela orang-orang yang menuntut kembali apa yang telah mereka berikan, memberi perumpamaan mereka dengan perumpamaan yang paling jelek bahkan lebih jelek dari jiwa dan pandangan yang hina. Allah mencela

---

<sup>77</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.122

<sup>78</sup> Abu Isa Muhammad, *Sunan At-Tirmidzi*, Jilid IV, (Libanon: Dar Al-Kitab, t.t), h.49.

mereka sebagai penghinaan kepada mereka karena perbuatan yang hina tersebut. Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الْعَاذُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ شَمَّ يَعُو دُفِي قَيْئِهِ . ( متفق عليه )<sup>79</sup>

Artinya: “dari Ibnu Abbas r.a Ia berkata: Bersabda Rasulullah SAW. “Orang-orang yang meminta kembali hibahnya adalah seperti anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahnya itu.”  
Muttafaq’Alaih).<sup>80</sup>

Hibah bisa menimbulkan rasa cinta dalam hati dan mempererat tali silaturahmi dan menghilangkan kedengkian. Sementara itu menuntut kembali barang yang sudah diberikan akan menimbulkan rasa permusuhan, kebencian dan mengajak kepada perpecahan, apalagi jika orang yang sudah diberi hibah tersebut sudah mempergunakan pemberian tersebut dan tidak mungkin untuk mengembalikan. Orang yang menuntut seperti itu merupakan manusia yang paling jahat jiwanya, paling hina tabi’atnya, dan paling dibenci oleh Allah, maka Allah memberi contoh dengan seekor anjing yang menelan kembali liurnya. Saling tolong menolong dengan cara memberi mengandung faedah yang besar bagi manusia, mungkin seorang datang membutuhkan sesuatu tapi tahu melalui jalan mana yang ia harus tempuh untuk mencukupi kebutuhannya. Pahala orang yang memberi tentu saja besar dan mulia.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulugh Al Maram Min Adillat Al Ahkam*, (Semarang: Taha Putera, t.th), h.192.

<sup>80</sup> Al-Bukhori, *Shahih Bukhari, Juz III*, (Beirut: Dar Al-Kitab Alamiyah, t.t), h.135.

<sup>81</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.125

Allah menafsirkan diri-Nya dengan firman-Nya surat Ali-Imran ayat 8:

رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ  
الْوَهَّابُ ((آل عمران: ٨))<sup>٨٢</sup>

Artinya: “Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong pada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karunialah kepada kami rahmat dari sisi engkau karena sesungguhnya engkau maha pemberi (karunia).

Apabila seseorang suka memberi berarti berusaha mendapatkan sifat paling mulia karena dalam memberi orang menggunakan kemuliaan, menghilangkan kebakhilan jiwa, memasukan kegembiraan kedalam hati orang yang memberi, mewariskan rasa kasih sayang dan terjalin rasa cinta antara pemberi dan penerima, serta menghilangkan rasa iri hati, maka orang yang suka memberi termasuk orang-orang yang beruntung. Allah berfirman dalam surat Al-Hashr ayat: 9

وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (الحشر: ٩)<sup>٨٣</sup>

Artinya: Dari siapa yang dipelihara dari kekinian dirinya mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Qs.Al-Hashr : 9).

Serta memberi adalah salah satu sifat kesempurnaan. Allah mensifati dirinya dengan firman-nya:

إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (آل عمران: ٨)<sup>٨٤</sup>

---

<sup>82</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Jumanatul'alr*, (Bandung: Art, 2997), h.50

<sup>83</sup> Ibid, h.917

<sup>84</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Jumanatul'alr*, (Bandung: Art, 2997), h.50

Artinya: Sesungguhnya engkau-lah maha pemberi (karunia).  
(QS.Ali-Imran: 8).

Apabila seseorang suka memberi berarti berusaha mendapatkan sifat paling mulia karena dalam member orang menggunakan kemuliaan, menghilangkan kebakhilan jiwa, memasukan kegembiraan ke dalam hati orang yang diberi, mewariskan rasa kasih sayang dan terjalin cinta antara pemberi termasuk orang-orang yang beruntung.<sup>85</sup>

## **2. Hibah Menurut Hukum Positif**

### **a. Pengertian Hibah**

Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan sesuatu badan sosial, keagamaan, ilmiah, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya.<sup>86</sup>

Menurut Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHperdata) : “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si pemberi hibah yang menerima penyerahan itu”.<sup>87</sup>

Ketika perkataan dalam penerimaan hibah yang diberikan ada perkataan “selama masih hidup” si penghibah adalah untuk membedakan si penghibah itu dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu

---

<sup>85</sup> Hadi Mulyo dan Shobahussurur, *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Cv.Asy Syifa, 1992), h.395-397

<sup>86</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.138.

<sup>87</sup> R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), h.436.

*testament* (surat wasiat) yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah si pemberi meninggal dan setiap waktu selama si pemberi itu masih hidup, dapat diubah dan ditarik kembali olehnya. Pemberian dalam *testament* itu dalam B.W dinamakan “*Legaat*” (Hibah wasiat).<sup>88</sup>

Adapun pengertian hibah menurut para ahli hukum, antara lain:

- 1) Sayid Sabiq, mengemukakan bahwa definisi hibah adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan.
- 2) Sulaiman Rasyid memberikan definisi hibah ialah memberikan zat dengan tidak ada tukarnya dan tidak ada karenanya.
- 3) H.M Arsyad Thalib Lubis menyatakan bahwa hibah ialah memberikan sesuatu untuk jadi milik orang lain dengan maksud berbuat baik yang dilakukan dalam masa hidup orang yang memberi.
- 4) Subekti mengemukakan bahwa penghibah ini digolongkan pada apa yang dinamai perjanjian “dengan cuma-cuma” (bahasa belanda *omniet*) di mana perkataan dengan cuma-cuma itu ditunjukkan pada hanya ada prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain tidak usah memberikan kontra prestasi sebagai imbalan.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> An-Nida, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.40, No.2 Juli – Agustus 2015 Tersedia di <http://ejournal.uin.suska.ac.id/index.php/anida> (Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2020 Pukul 11.43 WIB).

<sup>89</sup> I.Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung: PT.Alumni, 2008), h.72.

Dalam beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hibah ini adalah merupakan salah satu pemberian yang bersifat sukarela (tidak ada sebab dan musababnya) tanpa ada kontra prestasi dari pihak penerima pemberi dan pemberian itu dilaksanakan pada saat pemberi masih hidup. Dalam istilah hukum perjanjian yang seperti ini dinamakan juga dengan perjanjian sepihak (perjanjian unilateral) sebagai lawan dari perjanjian bertimbal balik (perjanjian bilateral).<sup>90</sup>

#### **b. Unsur-unsur Hibah**

Dari pengertian hibah yang terdapat dalam Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat diketahui unsur-unsur hibah sebagai berikut:

- 1) Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma. Artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.
- 2) Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.
- 3) Objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.
- 4) Hibah tidak dapat ditarik kembali
- 5) Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
- 6) Hibah harus dilakukan dengan akta notaries.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.113.

<sup>91</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agrarian Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, (Jakarta: Djambatan, 2007), h.265.



### c. Rukun dan Syarat Hibah

Dalam KUHPerdara syarat-syarat pemberi hibah yakni :

- 1) Pemberi hibah diisyaratkan sudah dewasa yaitu mereka yang telah mencapai umur 21 tahun atau sudah pernah menikah (Pasal 330 KUHPerdara)
- 2) Hibah itu diberikan saat penghibah masih hidup
- 3) Tidak mempunyai hubungan perkawinan suami istri dengan penerima hibah, dengan kata lain hibah anantara suami istri selama perkawinan tidak diperbolehkan. Berdasarkan Pasal 1678 ayat 1 KUHPerdara, tetapi KUHPerdara masih memperbolehkan hibah yang dilakukan antara suami istri terhadap benda-benda yang harganya tidak terlalu tinggi sesuai dengan kemampuan, ada perjabaran lebih lanjut tentang batasan nilai atau harga benda-benda yang dihibahkan itu. Jadi ukuran harga yang tidak terlalu tinggi itu sangat tergantung kondisi ekonomi serta kedudukan sosial mereka dalam masyarakat.<sup>92</sup>

Dalam KUHPerdara syarat-syarat penerima hibah yakni :

- 1) Penerima hibah sudah ada pada saat terjadinya penghibahan atau bila ternyata kepentingan si anak yang ada di dalam kandungan telah menghendaknya, maka undang-undang dapat menganggap anak yang ada di dalam kandungan itu sebagai telah dilahirkan (Pasal 2 KUHPerdara).

---

<sup>92</sup> R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), h.440.

- 2) Lembaga-lembaga umum atau lembaga keagamaan juga dapat menerima hibah, asalkan presiden atau penguasa yang ditunjuk olehnya yaitu menteri kehakiman, memberi kekuasaan kepada pengurus lembaga-lembaga tersebut untuk menerima pemberian itu (Pasal 1680 KUHPerdara).
- 3) Pemberian hibah bukan bekas wali dari pemberi hibah, tetapi apabila si wali telah mengadakan perhitungan pertanggungjawaban atas perwakilannya, maka bekas wali itu dapat menerima hibah (dalam Pasal 904 KUHPerdara)
- 4) `Penerima hibah bukanlah notaris yang dimana perantaranya dibuat akta umum dari suatu wasiat yang dilakukan oleh pemberi hibah dan juga bukan saksi yang menyelesaikan pembuatan akta itu (Dalam pasal 907 KUHPerdara).<sup>93</sup>

Dalam KUHPerdara syarat-syarat benda yang dihibahkan adalah sebagai berikut :

- 1) Benda yang dihibahkan harus merupakan benda yang sudah ada saat penghibahan itu dilakukan. Suatu hibah adalah batal atau tidak sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang belum ada atau baru akan ada dikemudian hari (Pasal 1667 KUHPerdara).
- 2) Jumlah harta atau benda-benda itu tidak boleh melanggar atau melebihi jumlah *legitime portie* (suatu bagian mutlak dari ahli waris yang akan meninggalkan warisan atau tidak dikurangi dengan pemberian semasa

---

<sup>93</sup> *Idib.* h.441

hidup si pewaris atau pemberian dengan wasiat (Pasal 913 KUHPerdara).<sup>94</sup>

Dalam KUHPerdara hak dan kewajiban para pihak dalam hibah adalah sebagai berikut :

- 1) Hak yang timbul dari perjanjian hibah
- 2) Pemberi hibah berhak untuk memakai sejumlah uang atau benda yang dihibahkannya, asalkan hak ini diperjanjikan dalam penghibahan (Pasal 1671 KUHPerdara).
- 3) Pemberi hibah berhak untuk mengambil benda yang telah diberikan nya jika si penerima hibah dan keturunan-keturunannya meninggal terlebih dahulu dari si penghibah, dengan catatan ini dapat berlaku sudah diperjanjikan terlebih dahulu (pasal 1672 KUHPerdara)
- 4) Pemberi hibah dapat menarik kembali pemberiannya, jika penerima hibah tidak mematuhi kewajiban yang telah ditentukan dalam akta hibah atau hal-hal lain yang dinyatakan dalam KUHPerdara.
  - a) Kewajiban yang timbul dari perjanjian hibah
    - (1) Penerima hibah berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang penghibah atau benda-benda lain, dengan catatan hutang-hutang atau beban-beban yang harus dibayar itu disebutkan dengan tegas didalam akta hibah.
    - (2) Penerima hibah diwajibkan untuk memberi tunjangan nafkah kepada pemberi hibah jika pemberi hibah jatuh dalam kemiskinan.

---

<sup>94</sup> Helmi karim, *fiqih muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo persada, 2002), h.75

- (3) Penerima hibah diwajibkan untuk mengembalikan benda-benda yang telah dihibahkan, kepada pemberi dan pendapatannya terhitung mulai dimajukannya gugatan untuk menarik kembali hibah berdasarkan alasan-alasan yang diatur oleh KUHPerdarta. Apabila benda yang dihibahkan telah dijual, maka penerima berkewajiban untuk mengembalikan pada waktu dimasukannya gugatan dengan disertai hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan sejak saat itu (KUHPerdarta).
- (4) Pemberi hibah berkewajiban untuk memberi ganti rugi kepada pemberi hibah, untuk hipotik-hipotik dan benda-benda lainnya yang dilekatkan olehnya diatas benda tidak bergerak.<sup>95</sup>

#### **d. Subjek dan Objek Hibah**

Berkaitan dengan hibah yang dimana hibah diberikan secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah
- 2) Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup
- 3) Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris maka hibah batal

---

<sup>95</sup> Ali Affandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h.74

- 4) Hibah antara suami dan isteri selama dalam perkawinan dilarang, kecuali jika yang dihibahkan itu benda-benda bergerak yang harganya tidak terlampau mahal.

Dalam hukum dijelaskan bahwa setiap orang dapat menjadi subjek hukum, tetapi menurut ketentuan undang-undang ada subjek hukum yang tidak sempurna artinya bahwa subjek hukum itu hanya mempunyai kehendak tetapi tidak mampu untuk menuangkan kehendaknya di dalam perbuatan hukum, subjek hukum yang dimaksud tersebut adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa/anak dibawah umur,
- 2) Orang dewasa tetapi tidak mampu berbuat (gila)
- 3) Wanita dalam perkawinan.<sup>96</sup>

Objek hibah adalah benda-benda atau barang-barang yang diperjanjikan untuk diberikan atau diserahkan secara cuma-cuma di dalam perjanjian hibah. Objek hibah salah satunya yaitu benda tidak bergerak seperti tanah. Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mengingat Indonesia masih merupakan Negara agraris, sehingga kepastian keberadaan tanah haruslah di dukung oleh kepastian surat-surat atau dokumen yang sah, dimana dengan adanya kepastian tersebut akan menjadikan ketenangan bagi pemilik untuk memanfaatkannya.<sup>97</sup>

Menurut kitab undang-undang hukum perdata barang dibedakan menjadi dua yaitu:

---

<sup>96</sup> Subekti R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Internusa, 1994), h.41-42

<sup>97</sup> *Ibid*, h.44

### 1) Barang Bergerak

Barang bergerak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Barang bergerak yang berwujud, yaitu setiap benda yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain tanpa mengubah wujud, bentuk dan kegunaan bagi benda tersebut sebagai satu kesatuan
- b) Barang bergerak tidak berwujud, yaitu segala hak atau penagihan atas barang tidak bergerak.

### 2) Barang tidak bergerak

Pasal 506 kitab undang-undang hukum perdata menyatakan bahwa kebendaan tidak bergerak adalah:

- a) Tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya.
- b) Penggilingan, kecuali yang dibicarakan dalam Pasal 510
- c) Pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam tanah, buah pohon yang belum dipetik, demikian pula barang-barang tambang seperti batu bara, sampah bara dan sebagainya selama benda itu belum terpisah dan digali dari tanah.
- d) Kayu tebangan dari hutan dan kayu dari pohon-pohon yang berbatang tinggi selama kayu tersebut belum ditebang.
- e) Pipa-pipa dan got-got yang diperuntukan guna menyalurkan dari rumah atau pekarangan dan pada umumnya segala sesuatu yang tertancap dalam pekarangan atau terpasang dalam bangunan rumah.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Subekti R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*....,h.46-47



#### e. Cara Memperoleh Hibah

Dalam hukum positif, mengenai hibah diatur dalam pasal 1666 – pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian hibah terdapat dalam pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. undang-undang mengakui hibah yang terjadi diantara orang-orang yang masih hidup. Akta hibah berdasarkan pasal 1682 harus dibuat dimuka notaries. Hibah diatur dalam KUHPerdato Bab X Buku III tentang perikatan.<sup>99</sup>

Dalam KUHPerdato memuat substansi hukum penghibahan yang terdiri dari 4 bagian berisi Pasal 1666-1693, bagian-bagian tersebut yaitu :

- 1) Pada bagian pertama memuat ketentuan-ketentuan umum yang terdiri dari pengertian tentang penghibahan, penghibahan yang dilakukan oleh orang hidup, barang penghibahan, syahnya penghibahan dan syarat-syarat penghibahan.
- 2) Pada bagian kedua memuat tentang kemampuan untuk memberikan dan menerima hibah yang berisi tentang orang-orang yang berhak memberikan dan menerima hibah dan penghibahan suami istri.
- 3) Bagian ketiga memuat cara penghibahan sesuatu yang berisi tentang pembuatan akta hibah pada notaris, hibah
- 4) kepada wanita dan kepada anak-anak di bawah umur.

---

<sup>99</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

5) Bagian keempat memuat tentang pencabutan dan pembatalan hibah yang berisi tentang syarat-syarat pencabutan dan pembatalan suatu hibah.<sup>100</sup>

Tata cara hibah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , sebagai berikut :

- 1) Pemberi hibah harus sudah dewasa, yakni cakap menurut hukum, kecuali dalam hak yang ditetapkan dalam Bab ke tujuh dari buku ke saku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ).
- 2) Suatu hibah harus dilakukan dengan suatu akta Notaris yang aslinya disimpan oleh Notaris (Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- 3) Suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan suatu akibat mulai dari penghibah dengan kata-kata yang tegas yang diterima oleh si penerima hibah (Pasal 1683 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- 4) Penghibah kepada orang yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua (Pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).<sup>101</sup>

Sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, bagi mereka yang tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta hibah harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris

---

<sup>100</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, h.440

<sup>101</sup> Siumanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2000), h.180

sebagaimana yang disebutkan diatas. Namun, setelah lahirnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, setiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Mengenai bentuk, isi dan cara pembuatan akta-akta PPAT (termasuk akta hibah) terdapat Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agrarian/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.<sup>102</sup>

#### **f. Cara Hapusnya Hibah**

Pasal 1666 sampai dengan 1693 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau KUHPerdata yang notabene berasal dari hukum barat) menyatakan bahwa hibah adalah persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara Cuma-Cuma tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu, penghibahan tersebut adalah bagi kepentingan para pihak yang masih hidup yang juga penting diperhatikan dalam hibah menurut hukum positif adalah bahwa hibah dilakukan oleh orang yang sudah dewasa (bisa benda tetap maupun benda bergerak) dan diberikan kepada orang dewasa atau anak kecil (dengan perantara wali/orang tua) dan dicatat di notaris. Bahkan ketentuan dalam KUHPerdata tentang pencatatan harta hibah diperkuat dengan PP No.24 tahun 1997 tentang pemberian hibah

---

<sup>102</sup> Tri Jaya Pramesti, 23 September 2013,  
<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ltlhle582blad14c/prosedur-hibah-tanah-dan-bangunan-kepada-keluarga>

tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta PPAT (pejabat pembuat akta tanah) dan dihadiri oleh dua orang saksi. Ketentuan ini sangat jelas karena telah terjadi peralihan hak dan dengan demikian maka hibah (atas benda tetap) menurut hukum positif tidak dapat dilakukan secara diam-diam. Bahkan pemberian berupa hibah yang menyebabkan “terzolimi” hak ahli waris dapat dibatalkan (Pasal 881 KUHPerdara). Penghibahan tidak boleh diperjanjikan sejak semula dan penghibah tidak dapat menarik hibahnya tanpa izin penerima hibah. Penarikan kembali suatu hibah hanya dimungkinkan apabila terdapat persetujuan antara kedua belah pihak, hal ini berbeda dengan hibah wasiat yang sewaktu-waktu dapat dicabut, atau ditarik kembali selama pewaris masih hidup.<sup>103</sup>

Penarikan suatu hibah dimungkinkan apabila terdapat persetujuan antara kedua belah pihak karena hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk kemungkinan itu. Kemungkinan itu diberikan dalam Pasal 1668 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berupa tiga hal, yaitu:

- 1) Apabila penerimaan hibah tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam penghibahan

---

<sup>103</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, h.192

Maksud dari ketentuan diatas adalah bahwa ada syarat dalam penghibahan yang tidak terpenuhi oleh penerima hibah, misalnya bahwa si penerima hibah merupakan orang yang tidak cakap hukum untuk dapat menerima suatu penghibahan, atau bahwa si penerima hibah merupakan orang yang tidak cakap hukum untuk dapat menerima suatu penghibahan, atau bahwa si penerima hibah belum/tidak ada pada saat penghibahan dilakukan (telah meninggal/belum dilahirkan).

- 2) Jika si penerima hibah telah terlibat bersalah atau memberikan bantuan tindak pidana yang mengancam jiwa si pemberi hibah, atau berupa kejahatan lain yang mengancam undang-undang dengan hukuman pidana, baik yang berupa kejahatan atau pelanggaran.

Maksud dalam ketentuan ini adalah suatu hibah dapat ditarik kembali oleh penerima hibah, apabila pihak penerima hibah telah melakukan perbuatan-perbuatan ataupun memberikan bantuan dalam hal perbuatan yang dapat mengancam keselamatan dan jiwa si pemberi hibah, atau perbuatan-perbuatan lain yang melanggar undang-undang dan dapat diancam dengan hukuman pidana.

- 3) Apabila si pemberi hibah jatuh miskin dan si pemberi hibah enggan memberikan bantuan nafkah kepadanya, pemberi nafkah dalam hal ini bukan merupakan kewajiban dan jumlahnya tidak ditentukan, akan tetapi adalah patut memberi nafkah sebagai balas budi yang didasarkan pada kelayakan sebagai ucapan terima kasih kepada si pemberi hibah.

4) Pemberi hibah berhak dan dapat menarik kembali hibahnya dari si penerima hibah apabila dikemudian hari pemberi hibah menghadapi penurunan di dalam kondisi perekonomian dan penerima hibah enggan/menolak untuk memberikan bantuan nafkah kepadanya, walaupun sebenarnya pemberian bantuan nafkah kepadanya, walaupun sebenarnya pemberian bantuan nafkah kepada pemberi hibah bukanlah suatu hal yang diwajibkan di dalam penghibahan, tetapi hal yang menyangkut rasa kemanusiaan dan sebagai bentuk balas budi serta rasa terima kasih dari penerima hibah kepada pemberi hibah.<sup>104</sup>

Berdasarkan ketentuan mengenai penarikan kembali hibah dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dapat dilihat bahwa suatu hibah dapat ditarik kembali dengan hal-hal tertentu yang telah difokuskan kepada pelanggaran ketentuan hibah yang dilakukan oleh penerima hibah dan si pemberi hibah diberi kekuasaan untuk dapat menarik kembali atau menghapus hibahnya terhadap penerima hibah.<sup>105</sup>

## **B. Tinjauan Pustaka**

Sejauh pengetahuan penulis, pada saat ini terdapat beberapa karya ilmiah seperti jurnal, artikel, ataupun karya ilmiah lainnya yang membahas tentang sistem ataupun praktik hibah maupun masalah yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi penulis menguraikan serangkaian

---

<sup>104</sup> Sumanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2000), h.186-187

<sup>105</sup> *Ibid*, h.188

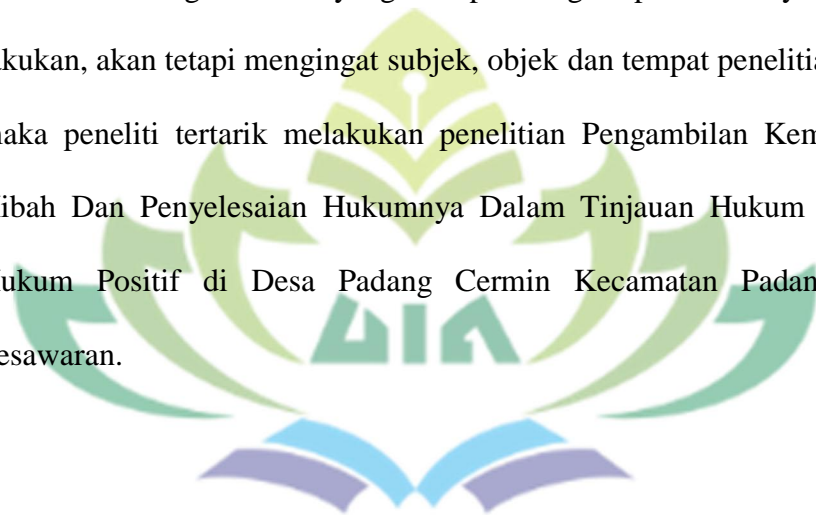


tinjauan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan praktik hibah di masyarakat.

1. Skripsi dari Nurhijrah Hairunnisa (2017) dengan judul :”Tinjauan Hukum Tanah Hibah Yang Disengketakan Akibat Tidak Adanya Bukti Akta Hibah”. UIN Aluddin Makasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik tanah hibah yang disengketakan di pengadilan akibat tidak adanya akta hibah. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah tinjauan hukum tanah hibah yang disengketakan akibat tidak adanya bukti akta hibah itu disengketakan dalam pengadilan sedangkan penelitian penulis dalam pengambilan tanah hibah tersebut belum dilakukan di pengadilan.
2. Penelitian selanjutnya dari Skripsi Anggita (2017) yang berjudul: ”Penarikan Kembali Harta Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam”. IAIN Raden Intan Lampung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah: Dalam skripsi ini membahas tentang praktik hibah yang diambil kembali oleh pemberi hibah dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis dalam pengambilan harta hibah dilakukan oleh ahli waris penghibah.
3. Penelitian selanjutnya Skripsi Faturrahman Khairi (2018) yang berjudul “Penarikan Kembali Barang Hibah Dalam Hukum Normatif Perspektif Imam Syafi’i”. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsep penarikan kembali barang hibah dalam hukum positif ditinjau menurut perspektif Imam Syafi’i. perbedaan penelitian ini dalam hukum Islamnya lebih mengacu pada

pendapat Imam Syafi’I dan penarikan tersebut boleh adanya dengan syarat penerima hibah menyetujuinya, sedangkan penelitian penulis dalam penghibahan tersebut yakni pengambilan kembali harta hibah ditinjau dalam hukum Islam dan hukum positif penerima hibah tidak menyetujui penarikan hibah tersebut dan penarikan hibah tersebut dilakukan secara sepihak saja oleh pewaris pemberi hibah.

Dengan demikian, dari beberapa skripsi diatas memiliki kesamaan topik yaitu membahas tentang hibah yang diambil kembali. Meskipun telah disebutkan dengan tema yang serupa dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi mengingat subjek, objek dan tempat penelitian berbeda, maka peneliti tertarik melakukan penelitian Pengambilan Kembali Harta Hibah Dan Penyelesaian Hukumnya Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran.



### **BAB III**

#### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

##### **C. Gambaran Lokasi Penelitian**

Kecamatan Padang Cermin merupakan bagian dari Kabupaten Pesawaran yang terletak sebelah selatan perbatasan dengan wilayah Bandar Lampung yang awal mulanya merupakan bagian dari Lampung Selatan. Sejak Tahun 2007 mengalami pemekaran wilayah Kabupaten.

Kabupaten Pesawaran memiliki 11 kecamatan diantaranya yakni Kecamatan Padang Cermin. Wilayah administrasi Kecamatan Padang Cermin dibagi atas 11 desa/kelurahan diantaranya adalah Desa Gayau, Desa Sanggi, Desa Durian, Desa Padang Cermin, Desa Banjaran, Desa Khepong Jaya, Desa Hanau Berak, Desa Tambangan, Desa Paya, Desa Wayurang dan Desa Trimulyo, dengan pusat pemerintahan Kecamatan Padang Cermin berada di Desa Padang Cermin. Luas wilayah Kecamatan Padang Cermin 31.763 Ha. Dengan ini Kecamatan Padang Cermin merupakan wilayah terluas yang ada pada Kabupaten Pesawaran.

##### **1. Sejarah singkat berdirinya Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran**

Desa Padang Cermin merupakan Bagian Dari Kecamatan Padang Cermin. Secara Geografis Desa Padang Cermin terletak di sebelah utara Desa persiapan Dantar, sebelah selatan Desa Banjaran, sebelah barat Desa Khepong Jaya dan sebelah timur Desa Durian.

Desa Padang Cermin memiliki 8 (delapan) Desun dan 1 Pedukuhan. sejak saat itu sudah ada 9 kepala desa yang memimpin Desa Padang

Cermin tersebut di dalam Pedukuhan Ketepan memiliki 65 kepala keluarga. . Terinci dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1

No	Nama Kepala Desa	Tahun Menjabat
1	Ismail	1944-1949
2	Fatimah	1949-1959
3	Sahdan	1956-1961
4	Zuljuhdi	1961-1969
5	Said Muhsin	1969-1978
6	Karim Ali	1978-1984
7	Saleh	1984-1991
8	Sahal	1991-1999
9	Ibrahim Harun	1999- Sekarang

(Sumber: Monografi Pemerintahan Desa Padang Cermin Tahun 2020)

Pedukuhan ketepan yang berada dalam wilayah Dusun kejadian pamemiliki dua kadus yang pernah menjabat dari tahun ke tahun, yakni :

Tabel 2

No	Nama Kepala Dusun	Jabatan
1	Marzuki	2010 – 2016
2	Primayanta	2016- 2020

(Sumber :Monografi Pemerintahan Desa Padang Cermin Tahun 2020)

Desa padang cermin kecamatan padang cermin ini terdiri dari beberapa suku, yaitu lampung, sunda, jawa dan semendo, dengan perincian table dibawah ini :

Tabel 4

NO	SUKU	Presentase (%)
1	Lampung	60 %
2	Sunda	20 %
3	Jawa	10%
4	Semendo	10%

(Sumber: Monografi Pemerintahan Desa Padang Cermin Tahun 2020)

Mayoritas masyarakat Desa Padang Cermin ini memiliki mata pencaharian sebagai Buruh Tani/ Petani dan mayoritas agama yang mereka anut yakni agama Islam. Dengan perincian table dibawah ini.

Tabel 5

NO	MATA PENCAHARIAN	PRESENTASE
1	PETANI	40%
2	PEDAGANG	30%
3	BURUH	20%
4	PNS	10%

(Sumber: Monografi Ketetapan Desa Padang Cermin Tahun 2020)

Jumlah penduduk Desa Padang Cermin Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 6

No	Jenis Kelamin Penduduk	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	Jiwa/Orang	60 %
2	Perempuan	Jiwa/Orang	40 %
Jumlah Total		Jiwa/Orang	100 %

(Sumber: Monografi Desa Padang Cermin)

**Struktur Organisasi Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin,  
Pesawaran**



**D. Praktik Pengambilan Kembali Harta Hibah Di Desa Padang Cermin  
Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran**

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari bantuan orang lain dan saling ketergantungan. Karena ketergantungan semacam ini, maka manusia harus menciptakan suatu hubungan yang baik antara satu sama lainnya. Tidak terkecuali pula dalam kegiatan *muamalah* seperti jual beli, upah mengupah, hutang piutang, hibah,



dan lain-lain. Salah satu kegiatan *bermuamalah* dalam Islam adalah hibah, yakni pemberian secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa suatu imbalan apapun.

Hibah merupakan salah satu pemberian yang bersifat sukarela (tidak ada sebab dan musababnya) tanpa ada kontra prestasi dari pihak penerima pemberi dan pemberian itu dilangsungkan pada saat pemberi masih hidup.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bpk.Ibrahim Harun selaku kepala desa Padang Cermin, Pelaksanaan hibah terjadi antara dua pihak yaitu bapak Abdul Kadir selaku pemberi hibah dan masyarakat selaku penerima hibah. Bapak Abdul Kadir merupakan penduduk asli Pedukuhan Ketepan Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran, sedangkan masyarakat juga merupakan penduduk asli wilayah tersebut.<sup>106</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zamroni selaku pengurus musholla dalam hibah yang terjadi di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran berawal dari inisiatif dan rasa iba si pemberi hibah sendiri yakni bapak Abdul kadir karena di pedukuhan ketepan ini sangat jauh dari masjid dan di pedukuhan ketepan ini belum mempunyai masjid ataupun musholla sehingga jarak tempuh mereka untuk shalat berjamaah sangatlah jauh apalagi ketika jelang bulan suci ramadhan, pada saat itu masyarakat sedang mengadakan perkumpulan dan disitulah bapak Abdul Kadir memberikan tanahnya seluas 8 x 12 meter persegi secara lisan didepan sekumpulan masyarakat penduduk asli Pedukuhan Ketepan. Dalam hal pemberian itu tidak

---

<sup>106</sup> Ibrohim Harun, Kepala Desa Padang Cermin, Wawancara 12 Februari 2020

ada sama sekali unsur paksaan dari pihak manapun dan tanah tersebut benar-benar asli milik bapak Abdul kadir dan tidak termasuk tanah sengketa. Setelah tanah itu dihibahkan oleh bapak Abdul Kadir kepada masyarakat untuk didirikan sebuah masjid, tetapi karena dana yang kurang memadai untuk langsung didirikan masjid akhirnya masyarakat sepakat untuk membuat musholla terlebih dahulu. Setelah kurang lebih 1 tahun 2 bulan masyarakat bergotong royong membuat musholla tersebut akhirnya musholla sudah bisa dipakai layaknya seperti tempat ibadah agama Islam yang lainnya. Seiring berjalanya waktu pada tahun 2004 bapak Abdul Kadir meninggal dunia.<sup>107</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Prima Yanta selaku Kepala Dusun Pada tahun 2006 masyarakat mengajukan pengajuan dana bantuan untuk membangun musholla tersebut menjadi sebuah masjid, namun persyaratan pencairan dana tersebut harus adanya surat kepemilikan secara sah atau akta hibah karena pada saat itu bapak almarhum Abdul Kadir menghibahkan tanahnya secara lisan, lalu masyarakat membuat akta hibah tersebut dengan meminta tanda tangan ahli waris dari alm bapak Abdul Kadir yakni bapak Samsudin anak laki-laki tertua dari bapak Abdul kadir, karena pada tahun 1983 bapak Samsudin sudah berusia 60 tahun, tetapi bapak Samsudin tidak mau memberikan tanda tanganya tanpa alasan yang jelas sehingga permasalahan tersebut berlarut-larut selama empat tahun.<sup>108</sup>

Wawancara dengan bapak Halimik selaku salah satu saksi yang masih hidup dalam penyerahan harta hibah tersebut kami masyarakat berinisiatif

---

<sup>107</sup> Zahroni, Pengurus Musholla Pedukuhan Ketepan, Wawancara 12 Februari 2020

<sup>108</sup> Prima Yanta Kepala Dusun Pedukuhan Ketepan, Wawancara 12 Februari 2020

melakukan pertemuan bermusyawarah mufakat untuk mencari solusi bersama. Dalam perkumpulan itu bapak Samsudin tetap bersikeras tidak mau memberikan tanda tanganya dan ingin mengambil kembali harta hibah dikarenakan akta hibah dari alm bapaknya tersebut tidak tercatat dinotaris. sehingga dalam pertemuan itu tetap tidak menemukan kejelasan sampai saat ini.<sup>109</sup>

Hasil wawancara dengan bapak syukur yang juga merupakan saksi dalam pertemuan pemberian tanah hibah tersebut ia menerangkan bahwa tanah itu diberikan atas dasar kehendaknya sendiri dan pemberian tersebut kami terima, kami percaya pemberian tersebut bukanlah main-main dan pada waktu itu kami tidak harus adanya akta hibah. Dalam penyerahan tanah tersebut kami lakukan secara langsung dan tertulis di atas selembar kertas.<sup>110</sup>

Dari hasil wawancara dengan keluarga penghibah ibu Romlah yang merupakan anak alm bapak Abdul Kadir menerangkan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kekeluargaan sudah dilakukan namun tidak ada titik terang.<sup>111</sup>

Hasil wawancara ibu siti selaku adik kandung dari bapak Samsudin juga telah membujuk sang kakak untuk memberikan surat tanah tersebut kepada masyarakat pedukuhan ketepan agar terlaksananya kelanjutan musholla yang ingin dijadikan masjid namun ibu siti tidak mampu membujuk bapak

---

<sup>109</sup> Halimik, Saksi, Wawancara 11 Februari 2020

<sup>110</sup> Syukur, Saksi, Wawancara 12 februari 2020

<sup>111</sup> Romlah, Anak Kandung Bapak Samsudin, Wawancara 12 Februari 2020

Samsudin dan mendapat ancaman dari bapak Samsudin untuk tidak ikut campur dalam masalah tersebut.<sup>112</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Ijal yang juga termasuk keluarga sekaligus penduduk asli pedukuhan ketepan. Ia juga sudah mencoba meleraikan masalah dengan cara menawarkan sejumlah uang yang dijanjikan kepada bapak Samsudin agar beliau mau menandatangani surat keterangan hibah tersebut, tetapi bapak Samsudin tetap tidak mau memberikan tanda tangannya. Kemudian bapak Ijal membeli tanah warga yang terletak dibelakang tanah yang dihibahkan tersebut, rencananya tanah tersebut akan ia berikan kepada warga Pedukuhan Ketepan untuk didirikan masjid tetapi rencana tersebut tidak terealisasi karena jalan untuk masuk ke dalamnya adalah satu-satunya lewat tanah bapak Samsudin tersebut tetapi bapak Samsudin tidak mengizinkan tanahnya untuk dijadikan akses jalan dan memagar keliling tanah tersebut. Hal tersebut membuat warga bingung untuk mengambil langkah apa sehingga pembangunan tersebut tidak lagi dilanjutkan.<sup>113</sup>

Hasil wawancara dengan bapak M.Agus ia menyampaikan bahwa pak Samsudin melarang keras melakukan pembangunan. Walaupun pembangunan tersebut dari dana iuran ataupun sumbangan masyarakat yang tidak memerlukan surat keterangan akta hibah, ia tetap melarang dan mengancam apabila pembangunan tersebut tetap dilanjutkan ia tidak akan segan-segan merobohkan bangunan tersebut atau menjual tanah dan bangunannya kepada

---

<sup>112</sup> Siti, Anak Kandung Penghibah, Wawancara 12 Februari 2020

<sup>113</sup> Ijal, Saudara Penghibah, Wawancara 12 Februari 2020

orang lain. Sehingga terjadilah perdebatan yang mengakibatkan kerenggangan antara bapak Samsudin dengan masyarakat Pedukuhan Ketepan. kerenggangan ini menimbulkan dampak yang besar yakni masyarakat sepakat apabila kelak suatu saat bapak Samsudin meninggal dunia masyarakat tidak akan membantu penguburannya. Karena pada saat itu masyarakat tidak terlalu paham dengan hukum dan jika mereka ke pengadilan mereka merasa kurang kuat untuk bukti karena ahli waris masih memegang sertifikat tanah tersebut karena hibah itu dilakukan secara lisan dan tertulis hanya di selembar kertas saja oleh penghibah langsung didepan para penduduk pedukuhan dan tidak tercatat dinotaris.<sup>114</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Mat Hasan ,pembangunan musholla tersebut akan dilakukan ulang dengan sebidang tanah kecil yang sudah dibeli oleh bapak Ijal saudara si penghibah di belakang musholla yang sudah terbangun itu namun bapak Samsudin memagar keliling tanah tersebut dengan tujuan ia tidak mau meberikan akses jalan masuk ke tanah yang akan dibangun itu sehingga rencana warga untuk membangun sebuah musholla baru gagal untuk dilaksanakan.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> M.Agus, Warga Pedukuhan Ketepan, Wawancara 12 Februari 2020

<sup>115</sup> Mat Hasan, Warga Pedukuhan Ketepan, Wawancara 12 Februari 2020.

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

##### **E. Gambaran Lokasi Penelitian**

Kecamatan Padang Cermin merupakan bagian dari Kabupaten Pesawaran yang terletak sebelah selatan perbatasan dengan wilayah Bandar Lampung yang awal mulanya merupakan bagian dari Lampung Selatan. Sejak Tahun 2007 mengalami pemekaran wilayah Kabupaten.

Kabupaten Pesawaran memiliki 11 kecamatan diantaranya yakni Kecamatan Padang Cermin. Wilayah administrasi Kecamatan Padang Cermin dibagi atas 11 desa/kelurahan diantaranya adalah Desa Gayau, Desa Sanggi, Desa Durian, Desa Padang Cermin, Desa Banjaran, Desa Khepong Jaya, Desa Hanau Berak, Desa Tambangan, Desa Paya, Desa Wayurang dan Desa Trimulyo, dengan pusat pemerintahan Kecamatan Padang Cermin berada di Desa Padang Cermin. Luas wilayah Kecamatan Padang Cermin 31.763 Ha. Dengan ini Kecamatan Padang Cermin merupakan wilayah terluas yang ada pada Kabupaten Pesawaran.

##### **2. Sejarah singkat berdirinya Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran**

Desa Padang Cermin merupakan Bagian Dari Kecamatan Padang Cermin. Secara Geografis Desa Padang Cermin terletak di sebelah utara Desa persiapan Dantar, sebelah selatan Desa Banjaran, sebelah barat Desa Khepong Jaya dan sebelah timur Desa Durian.

Desa Padang Cermin memiliki 8 (delapan) Desun dan 1 Pedukuhan. sejak saat itu sudah ada 9 kepala desa yang memimpin Desa Padang



Cermin tersebut di dalam Pedukuhan Ketepan memiliki 65 kepala keluarga. . Terinci dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1

No	Nama Kepala Desa	Tahun Menjabat
1	Ismail	1944-1949
2	Fatimah	1949-1959
3	Sahdan	1956-1961
4	Zuljuhdi	1961-1969
5	Said Muhsin	1969-1978
6	Karim Ali	1978-1984
7	Saleh	1984-1991
8	Sahal	1991-1999
9	Ibrahim Harun	1999- Sekarang

(Sumber: Monografi Pemerintahan Desa Padang Cermin Tahun 2020)

Pedukuhan ketepan yang berada dalam wilayah Dusun kejadian pamemiliki dua kadus yang pernah menjabat dari tahun ke tahun, yakni :

Tabel 2

No	Nama Kepala Dusun	Jabatan
1	Marzuki	2010 – 2016
2	Primayanta	2016- 2020

(Sumber :Monografi Pemerintahan Desa Padang Cermin Tahun 2020)

Desa padang cermin kecamatan padang cermin ini terdiri dari beberapa suku, yaitu lampung, sunda, jawa dan semendo, dengan perincian table dibawah ini :

Tabel 4

NO	SUKU	Presentase (%)
1	Lampung	60 %
2	Sunda	20 %
3	Jawa	10%
4	Semendo	10%

(Sumber: Monografi Pemerintahan Desa Padang Cermin Tahun 2020)

Mayoritas masyarakat Desa Padang Cermin ini memiliki mata pencaharian sebagai Buruh Tani/ Petani dan mayoritas agama yang mereka anut yakni agama Islam. Dengan perincian table dibawah ini.

Tabel 5

NO	MATA PENCAHARIAN	PRESENTASE
1	PETANI	40%
2	PEDAGANG	30%
3	BURUH	20%
4	PNS	10%

(Sumber: Monografi Ketetapan Desa Padang Cermin Tahun 2020)

Jumlah penduduk Desa Padang Cermin Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 6

No	Jenis Kelamin Penduduk	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	Jiwa/Orang	60 %
2	Perempuan	Jiwa/Orang	40 %
Jumlah Total		Jiwa/Orang	100 %

(Sumber: Monografi Desa Padang Cermin)

**Struktur Organisasi Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin,  
Pesawaran**



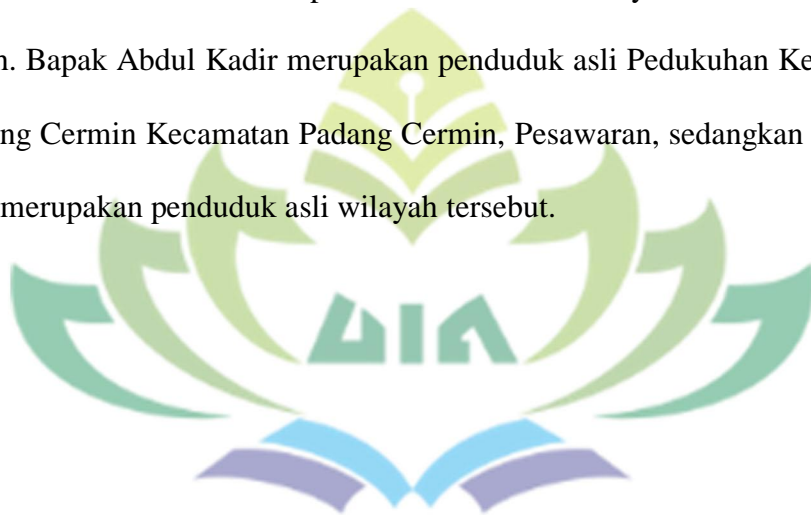
**F. Praktik Pengambilan Kembali Harta Hibah Di Desa Padang Cermin  
Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran**

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari bantuan orang lain dan saling ketergantungan. Karena ketergantungan semacam ini, maka manusia harus menciptakan suatu hubungan yang baik antara satu sama lainnya. Tidak terkecuali pula dalam kegiatan *muamalah* seperti jual beli, upah mengupah, hutang piutang, hibah,

dan lain-lain. Salah satu kegiatan *bermuamalah* dalam Islam adalah hibah, yakni pemberian secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa suatu imbalan apapun.

Hibah merupakan salah satu pemberian yang bersifat sukarela (tidak ada sebab dan musababnya) tanpa ada kontra prestasi dari pihak penerima pemberi dan pemberian itu dilaksanakan pada saat pemberi masih hidup.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bpk.Ibrahim Harun selaku kepala desa Padang Cermin, Pelaksanaan hibah terjadi antara dua pihak yaitu bapak Abdul Kadir selaku pemberi hibah dan masyarakat selaku penerima hibah. Bapak Abdul Kadir merupakan penduduk asli Pedukuhan Ketepan Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran, sedangkan masyarakat juga merupakan penduduk asli wilayah tersebut.



Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zamroni selaku pengurus musholla dalam hibah yang terjadi di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran berawal dari inisiatif dan rasa iba si pemberi hibah sendiri yakni bapak Abdul kadir karena di pedukuhan ketepan ini sangat jauh dari masjid dan di pedukuhan ketepan ini belum mempunyai masjid ataupun musholla sehingga jarak tempuh mereka untuk shalat berjamaah sangatlah jauh apalagi ketika jelang bulan suci ramadhan, pada saat itu masyarakat sedang mengadakan perkumpulan dan disitulah bapak Abdul Kadir memberikan tanahnya seluas 8 x 12 meter persegi secara lisan didepan sekumpulan masyarakat penduduk asli Pedukuhan Ketepan. Dalam hal pemberian itu tidak ada sama sekali unsur paksaan dari pihak manapun dan tanah tersebut benar-benar asli milik bapak Abdul kadir dan tidak termasuk tanah sengketa. Setelah tanah itu dihibahkan oleh bapak Abdul Kadir kepada masyarakat untuk didirikan sebuah masjid, tetapi karena dana yang kurang memadai untuk langsung didirikan masjid akhirnya masyarakat sepakat untuk membuat musholla terlebih dahulu. Setelah kurang lebih 1 tahun 2 bulan masyarakat bergotong royong membuat musholla tersebut akhirnya musholla sudah bisa dipakai layaknya seperti tempat ibadah agama Islam yang lainnya. Seiring berjalanya waktu pada tahun 2004 bapak Abdul Kadir meninggal dunia.<sup>116</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Prima Yanta selaku Kepala Dusun Pada tahun 2006 masyarakat mengajukan pengajuan dana bantuan untuk membangun musholla tersebut menjadi sebuah masjid, namun persyaratan

---

<sup>116</sup> Zahroni, Pengurus Musholla Pedukuhan Ketepan, Wawancara 12 Februari 2020

pencairan dana tersebut harus adanya surat kepemilikan secara sah atau akta hibah karena pada saat itu bapak almarhum Abdul Kadir menghibahkan tanahnya secara lisan, lalu masyarakat membuat akta hibah tersebut dengan meminta tanda tangan ahli waris dari alm bapak Abdul Kadir yakni bapak Samsudin anak laki-laki tertua dari bapak Abdul kadir, karena pada tahun 1983 bapak Samsudin sudah berusia 60 tahun, tetapi bapak Samsudin tidak mau memberikan tanda tanganya tanpa alasan yang jelas sehingga permasalahan tersebut berlarut-larut selama empat tahun.<sup>117</sup>

Wawancara dengan bapak Halimik selaku salah satu saksi yang masih hidup dalam penyerahan harta hibah tersebut kami masyarakat berinisiatif melakukan pertemuan bermusyawarah mufakat untuk mencari solusi bersama. Dalam perkumpulan itu bapak Samsudin tetap bersikeras tidak mau memberikan tanda tanganya dan ingin mengambil kembali harta hibah dikarenakan akta hibah dari alm bapaknya tersebut tidak tercatat dinotaris. sehingga dalam pertemuan itu tetap tidak menemukan kejelasan sampai saat ini.<sup>118</sup>

Hasil wawancara dengan bapak syukur yang juga merupakan saksi dalam pertemuan pemberian tanah hibah tersebut ia menerangkan bahwa tanah itu diberikan atas dasar kehendaknya sendiri dan pemberian tersebut kami terima, kami percaya pemberian tersebut bukanlah main-main dan pada waktu

---

<sup>117</sup> Prima Yanta Kepala Dusun Pedukuhan Ketepan, Wawancara 12 Februari 2020

<sup>118</sup> Halimik, Saksi, Wawancara 11 Februari 2020

itu kami tidak harus adanya akta hibah. Dalam penyerahan tanah tersebut kami lakukan secara langsung dan tertulis di atas selembar kertas.<sup>119</sup>

Dari hasil wawancara dengan keluarga penghibah ibu Romlah yang merupakan anak alm bapak Abdul Kadir menerangkan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kekeluargaan sudah dilakukan namun tidak ada titik terang.<sup>120</sup>

Hasil wawancara ibu siti selaku adik kandung dari bapak Samsudin juga telah membujuk sang kakak untuk memberikan surat tanah tersebut kepada masyarakat pedukuhan ketepan agar terlaksananya kelanjutan musholla yang ingin dijadikan masjid namun ibu siti tidak mampu membujuk bapak Samsudin dan mendapat ancaman dari bapak Samsudin untuk tidak ikut campur dalam masalah tersebut.<sup>121</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Ijal yang juga termasuk keluarga sekaligus penduduk asli pedukuhan ketepan. Ia juga sudah mencoba meleraikan masalah dengan cara menawarkan sejumlah uang yang dijanjikan kepada bapak Samsudin agar beliau mau menandatangani surat keterangan hibah tersebut, tetapi bapak Samsudin tetap tidak mau memberikan tanda tangannya. Kemudian bapak Ijal membeli tanah warga yang terletak dibelakang tanah yang dihibahkan tersebut, rencananya tanah tersebut akan ia berikan kepada warga Pedukuhan Ketepan untuk didirikan masjid tetapi rencana tersebut tidak terealisasi karena jalan untuk masuk ke dalamnya adalah

---

<sup>119</sup> Syukur, Saksi, Wawancara 12 februari 2020

<sup>120</sup> Romlah, Anak Kandung Bapak Samsudin, Wawancara 12 Februari 2020

<sup>121</sup> Siti, Anak Kandung Penghibah, Wawancara 12 Februari 2020



satu-satunya lewat tanah bapak Samsudin tersebut tetapi bapak Samsudin tidak mengizinkan tanahnya untuk dijadikan akses jalan dan memagar keliling tanah tersebut. Hal tersebut membuat warga bingung untuk mengambil langkah apa sehingga pembangunan tersebut tidak lagi dilanjutkan.<sup>122</sup>

Hasil wawancara dengan bapak M. Agus ia menyampaikan bahwa pak Samsudin melarang keras melakukan pembangunan. Walaupun pembangunan tersebut dari dana iuran ataupun sumbangan masyarakat yang tidak memerlukan surat keterangan akta hibah, ia tetap melarang dan mengancam apabila pembangunan tersebut tetap dilanjutkan ia tidak akan segan-segan merobohkan bangunan tersebut atau menjual tanah dan bangunannya kepada orang lain. Sehingga terjadilah perdebatan yang mengakibatkan kerenggangan antara bapak Samsudin dengan masyarakat Pedukuhan Ketepan. kerenggangan ini menimbulkan dampak yang besar yakni masyarakat sepakat apabila kelak suatu saat bapak Samsudin meninggal dunia masyarakat tidak akan membantu penguburannya. Karena pada saat itu masyarakat tidak terlalu paham dengan hukum dan jika mereka ke pengadilan mereka merasa kurang kuat untuk bukti karena ahli waris masih memegang sertifikat tanah tersebut karena hibah itu dilakukan secara lisan dan tertulis hanya di selembar kertas saja oleh penghibah langsung didepan para penduduk pedukuhan dan tidak tercatat dinotaris.<sup>123</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Mat Hasan ,pembangunan musholla tersebut akan dilakukan ulang dengan sebidang tanah kecil yang sudah dibeli

---

<sup>122</sup> Ijal, Saudara Penghibah, Wawancara 12 Februari 2020

<sup>123</sup> M. Agus, Warga Pedukuhan Ketepan, Wawancara 12 Februari 2020

oleh bapak Ijal saudara si penghibah di belakang musholla yang sudah terbangun itu namun bapak Samsudin memagar keliling tanah tersebut dengan tujuan ia tidak mau memberikan akses jalan masuk ke tanah yang akan dibangun itu sehingga rencana warga untuk membangun sebuah musholla baru gagal untuk dilaksanakan.<sup>124</sup>



---

<sup>124</sup> Mat Hasan, Warga Pedukuhan Ketepan, Wawancara 12 Februari 2020.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENELITIAN**

#### **4. Praktik Pengambilan Kembali Harta Hibah Di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran**

Dalam bab ini akan di analisis data yang telah diperoleh dari penelitian yang didapat oleh penulis dari metode *interview* dan wawancara sebagai metode pokok guna mendapatkan suatu keputusan objektif demi mendapatkan fakta terbaru.

Dalam hal Praktik pengambilan kembali harta hibah yang terjadi di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran ini bermula dari alm Bapak Abdul Kadir yang menghibahkan tanahnya seluas 8 x 12 m kepada masyarakat untuk didirikan masjid. Semasa hidup bapak Abdul kadir tanah hibah tersebut tidak terjadi masalah dengan pihak manapun dan pembangunan musholla berjalan dengan lancar, namun setelah bapak Abdul kadir meninggal dunia permasalahan pengambilan harta hibah itu muncul, yang bermula dari masyarakat ingin meminta tanda tangan kepada anak laki-laki alm Bapak Abdul kadir selaku ahli warisnya karena hibah yang diberikan itu dilakukan secara lisan dan ditulis diselembar kertas disaksikan oleh masyarakat Pedukuhan Ketepan ketika mereka berkumpul bersama, tetapi bapak Samsudin tidak mau memberikan tanda tangan untuk keterangan bahwa hibah itu sudah diberikan kepada masyarakat guna untuk mendapatkan bantuan pembangunan musholla menjadi masjid padahal dibutuhkannya tanda tangan tersebut karena pada saat pemberian hibah yang dilakukan alm Bapak Abdul Kadir kepada

Masyarakat secara lisan dan sudah mendapat persetujuan dari pihak keluarga termasuk bapak Samsudin.

Permasalahan yang timbul dalam pemberian hibah ini adalah bahwa pengambilan kembali harta hibah itu dilakukan oleh bapak Samsudin selaku anak laki-laki alm Bapak Abdul Kadir karena ia merasa tanah itu adalah hak miliknya karena sertifikat tanah tersebut masih berada ditangannya dan tidak akta hibah yang ditulis oleh notaris. Namun, Pihak keluarga terutama anak kandung yang lainnya dari alm Bapak Kadir mendukung untuk dilanjutkannya pembangunan tersebut tetapi bapak Samsudin selaku anak laki-laki satu-satunya itu mengancam adik-adiknya untuk tidak ikut campur dan jika mereka membukakan cara untuk masyarakat mendapatkan hak secara penuh terhadap tanah hibah tersebut iya tidak akan segan-segan untuk menjual tanah beserta bangunan yang sudah dibangun secara bergotong royong oleh masyarakat pedukuhan itu. Berdasarkan praktik pengambilan harta hibah bahwa pihak penerima hibah yakni masyarakat Pedukuhan Ketepan Desa padang cermin tersebut merasa dirugikan karena terjadinya pengambilan kembali tanah hibah oleh pihak pemberi hibah yang menimbulkan kerugian seperti ketidak jelasan dalam pemberian hibah, terhalangnya kepemilikan secara mutlak dan penuh, baik dalam kepemilikan serta kemanfaatan harta hibah. Dalam hal ini pihak penerima hibah yakni masyarakat benar-benar merasa dirugikan karena tanah yang dihibahkan oleh alm Bapak Abdul kadir itu sudah berdiri Musholla Pedukuhan ketepan yang akan dilanjutkan pembangunanya menjadi masjid.

## **5. Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pengambilan Kembali Harta Hibah**

### **1. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengambilan Kembali Harta Hibah**

Secara hukum Islam Penarikan kembali atas sesuatu hibah ialah merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah itu terjadi antara dua orang bersaudara atau suami dan istri. Adapun hibah yang boleh ditarik atau diambil kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anaknya.

Mengambil kembali harta hibah yang sudah diberikan adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji dan tercela, dalam pandangan masyarakat umum ataupun dalam pandangan hukum Islam pada dasarnya hibah menurut Ulama Mazhab Hambali adalah pemberian milik yang dilakukan oleh orang dewasa yang pandai terhadap sejumlah harta yang diketahui atau yang tidak diketahui namun sulit untuk mengetahuinya. Harta tersebut benar ada, dapat diserahkan dengan kewajiban tanpa imbalan.

Dari pengertian tersebut di dalamnya mempunyai arti berpindahnya suatu kepemilikan kepada orang lain. Karena pada saat pemberian barang yang telah diberikan secara otomatis telah beralih kepemilikan kepada orang lain. Oleh karena itu hibah yang sudah diberikan tidak boleh ditarik kembali, ini disebabkan karena si pemberi sudah tidak mempunyai hak kepemilikan serta masalah yang timbul karena si pemberi melakukan pemberian hibah itu secara lisan dan salah satu penjelasan dari saksi yang masih hidup dulu dilakukan diatas selembar kertas dan penerimanya

ditandatangani oleh salah satu perwakilan yg mengatasnamakan masyarakat asli pedukuhan tersebut.

Legitas fiqih muamalah, dalam hukum di Indonesia, diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI berisi aturan-aturan tentang hukum perdata yang dikhususkan untuk seorang muslim saja. Meskipun sudah disesuaikan dengan keadaan cultural bangsa Indonesia. Sumber utama dalam KHI tetap Al-Qur'an dan Hadist dan secara hirarki mengacu kepada peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) didalamnya tidak diperbolehkan pengambilan kembali barang hibah kecuali pengambilan kembali barang hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Kebolehan mengambil kembali hibah dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai keadilan.

Dalam Pasal 717 Kompilasi hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mengatur tentang pengambilan kembali barang hibah pada praktik hibah di dalam barang hibah tersebut sudah terdapat tambahan, baik tambahan yang menyatu maupun tambahan yang terpisah dari barang hibah diperbolehkan menariknya kembali pada barang hibah dan pada barang hibah yang tambahannya menyatu dengan barang hibah tetap tidak boleh ditarik kembali. Jika mengacu pada Pasal tersebut dan penarikan itu tetap dilakukan oleh ahli waris sang penghibah ,seharusnya tanahnya saja yang diambil dan bangunan yang sudah berdiri diatas tanah tersebut tidak bisa di tarik juga.

Penarikan kembali hibah dalam Islam merupakan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan karena pada dasarnya dalam pemberian hibah dilakukan dengan keikhlasan baik dari pemberi hibah, dari ahli waris maupun penerima hibah yang dilakukan dengan murni tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dikhususkan yaitu dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan (dikhususkan) seperti halnya jaminan. Imam Malik Asy-Syafi'i Ahmad dan Abu Tsaur berkata: Sesungguhnya hibah untuk umum yang tidak dibagi-bagi itu sah.

## **2. Tinjauan Hukum Positif Tentang Pengambilan Kembali Harta Hibah**

Dalam kehidupan bermasyarakat, kita hidup dalam naungan Negara Hukum, dimana semua tindakan masyarakat diatur oleh Undang-undang yang telah ditetapkan oleh kepemimpinan yang sah dimata hukum.

Hibah dalam kitab Undang-undang hukum perdata bersumber pada Pasal 1666 yang menyatakan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah pada waktu hidupnya dengan cuma-cuma dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup. Maksud dalam Pasal ini penarikan dalam hukum positif tidak diperbolehkan pengambil kembali harta hibah yang telah diberikan.



Apabila penarikan harta hibah itu tetap dilakukan dan pemberian harta hibah tersebut sudah terdapat tambahan selama hibah sudah diberikan, sebagaimana dijelaskan Pasal 1691 KUHPerdata yang menyatakan bahwa penerima hibah wajib mengembalikan yang dihibahkan itu bersama dengan buah dan hasilnya terhitung sejak hari gugatan diajukan kepada pihak pengadilan.

Telah dijelaskan bahwa sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, bagi mereka yang tunduk kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akta hibah harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris sebagaimana yang disebutkan diatas. Namun, setelah lahirnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, setiap pemeberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tetapi pemberian tersebut secara praktiknya di masyarakat dahulu mungkin keterbatasan untuk biaya ke notaris dan mereka hanya menuliskannya disecarik kertas karena pemberian hibah tersebut dilakukan secara sukarela oleh sang penghibah serta tidak ada paksaan dari pihak manapun dan disaksikan oleh tokoh masyarakat dan lebih dari 20 warga pedukuhan ketepan dan sudah disetujui oleh pihak keluarga. Disinilah kesalahan yang kurang dicermati atau dimengerti oleh masyarakat selaku penerima hibah serta masyarakat tidak terlalu memikirkan untuk jangka panjangnya terhadap harta hibah tersebut.

Mengenai bentuk, isi dan cara pembuatan akta-akta PPAT (termasuk akta hibah) terdapat Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agrarian/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Sesuai dengan peraturan yang sudah ada dan sesuai dengan berjalannya waktu karena masalah tersebut timbul setelah pemberi hibah sudah meninggal dunia dan pengambilan kembali harta hibah tersebut dilakukan oleh ahli warisnya.

#### **6. Penyelesaian Hukumnya Pengambilan Kembali Harta Hibah Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif.**

Allah telah menciptakan manusia untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan dengan cara *bermuamalah*. Prinsip dasar *bermuamalah* adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia sehingga dalam memenuhi kebutuhannya haruslah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang disebut dengan “Fiqih Muamalah” yang semuanya bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis.

Dalam permasalahan pemberian hibah yang terjadi di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang, Pesawaran karena tidak adanya akta hibah sehingga anak atau ahli warisnya bisa mengambil harta hibahnya tersebut jika ditinjau dalam peraturan yang ada pada saat ini karena lahirnya peraturan pemerintah tentang akta hibah itu dibuat pada tahun 1997 yakni Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997) bagi mereka yang tunduk kepada kitab Undang-undang hukum perdata harus dibuat dalam bentuk tertulis dari notaris, karena hibah tanah yang tidak dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan hukum, mereka yang tunduk pada hukum adat dapat membuatnya dibawah tangan,

tetapi proses di kantor pertanahan harus dibuat dengan akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti dapat mengambil suatu pemahaman bahwa praktik *bermuamalah* dalam pemberian hibah dan penerimaan hibah secara hukum Islam sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan yakni harus adanya keridhaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak dan dalam hukum Islam akad atau kesepakatan yang dilakukan sudah sesuai dengan keadaan yang pas di masa itu, pemberian hibah tersebut dilakukan langsung oleh pemilik asli dan penghibahan tersebut sudah disetujui oleh pihak keluarga dan tidak ada paksaan dari pihak manapun sehingga pemberian hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali, namun kekurangan pemahaman oleh masyarakat mengenai akta hibah yang harus dibuat oleh notaris dan pada tahun 1997 keluar peraturan dimana hibah tersebut harus dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) sehingga bukti itu kurang otentik dimata hukum dengan kesalahan yang dilakukan masyarakat maka pewaris penghibahan bisa mengambil harta hibah tersebut secara sepihak.

Pengambilan kembali harta hibah tersebut jika ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif walaupun tidak ada akta hibah, karena pemberian tersebut terjadi sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997, maka menurut pendapat saya pengambilan kembali harta hibah tersebut haruslah dilakukan di pengadilan, karena saksi dalam penerimaan hibah yang dilakukan pada tahun 1983 masih ada saksi hidup, agar menemukan titik terang yang baik dalam persoalan tersebut dan tidak adanya suatu perselisihan yang

akan terjadi terus-menerus sehingga tidak terjadi pula pengambilan harta hibah secara sepihak.

Terkait dengan hal ini kita sesama umat muslim yang taat akan peraturan Allah SWT dan Rasul-nya berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadis, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan karena jika terjadi perselisihan yang terjadi dapat menyebabkan perpecahan diantara umat manusia dan Islam tidak mengajarkan umatnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan agama Islam.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa Pengambilan Kembali Harta Hibah dan Penyelesaian Hukumnya dalam Tinjauan hukum Islam dan Hukum Positif di Desa Padang Cermin kecamatan Padang Cermin, Pesawaran sebagai berikut :

1. Praktik pengambilan kembali harta hibah di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran ini adalah bentuk pengambilan yang dilakukan secara sepihak dan tidak dilakukan dengan tata cara peraturan payung hukum yang berlaku yakni melalui jalur pengadilan.

Dimana bapak Abdul kadir memberikan tanah miliknya kepada masyarakat pedukuhan untuk dijadikan Masjid. Namun setelah bapak Abdul kadir meninggal dunia dan 2 tahun kemudian terjadilah perselisihan antar warga dengan ahli waris yang hendak mengambil tanah tersebut yang telah berdiri sebuah musholla dari tahun 1983 sampai dengan saat ini tetapi sudah tidak dipergunakan lagi musholla itu oleh masyarakat dari tahun

2016 sejak permasalahan tersebut muncul pada tahun 2006 karena musholla tersebut ditutup secara paksa oleh bapak Samsudin selaku ahli waris dari penghibah dan bapak Samsudin tidak memberikan alasannya menarik kembali tanah hibah tersebut.

2. Tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang pengambilan kembali harta hibah sudah jelas tidak dapat ditarik kembali karena akad yang

dilakukan sudah sesuai dengan peraturan yang tepat sesuai dengan hukum Islam dan Hukum Positif.

3. Penyelesaian hukumnya pengambilan kembali harta hibah ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif ini tidak dapat ditarik kembali karena prosedur yang dilakukan oleh pemberi hibah dan penerima hibah sudah sesuai dengan peraturan hukum perdata dan hukum ekonomi syariah yang ada pada saat itu, karena Hibah diatur di dalam 3 (tiga) hukum normative atau peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Kompilasi Hukum Islam. Termasuk didalamnya mengatur tentang penarikan kembali barang hibah dan jika tetap dilakukan pengambilan kembali harta hibah tersebut harus dilakukan dengan jalur Pengadilan guna menghindari perselisihan antar ahli waris dan masyarakat Pedukuhan Ketetapan tersebut karena kasus pengambilan kembali hibah tersebut bukan dilakukan oleh penghibah sendiri. Menarik kembali harta hibah itu hukumnya haram kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya.

#### **D. Rekomendasi**

1. Didalam kehidupan sehari-hari kita sebagai umat manusia harus saling tolong-menolong apalagi itu perihal untuk kerukunan bersama antar masyarakat dan menjadikan ladang pahala bagi kita yang memberikan pertolongan tersebut.
2. Dalam pelaksanaan pemberian suatu hibah haruslah memenuhi norma-norma yang berlaku yakni norma kepatutan ,norma agama dan norma

kesusilaan sehingga mempersempit pembatalan dan pengambilan kembali harta hibah tersebut dan haruslah tercatat dalam akta notaris.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.Karim, Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Esiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 1996.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat System Transaksi Dalam Islam*, Ed.1, Cet.1, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abu Bakar Muhammad, *Subulussalam Terjemah*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Abdul Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqih'ala Al-Mazhab Al-Arba'ah Juz 3*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2008.
- Abu Isa Muhammad, *Sunan At-Tirmidzi*, Jilid IV, Libanon: Dar Al-Kitab, t.th.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h.10
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet.III, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulugh Al Maram Min Adillat Al Ahkam*, Semarang: Taha Putera, t.th.
- Al-Imam Zainudin Ahmad bin Abd Al-Lathif Az-Zabidi, Mukhtashar *Shahih Al-Bukhari*, .Riadh Saudi Arabia: Daar As-Salam, 1996.
- Al-Imam Zainudin Ahmad Bin Abd Al-Lathif Az-Zabidi, *Mukhtshar Shahih Al-Bukhari Al-Musamma*, Terj.Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Bukhori, *Shahih Bukhari, Juz III*, Beirut: Dar Al-Kitab Alamiyah, t.th.
- Ali Affandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Ansori Umar, *Fiqh Wanita*, Semarang: CV Asy-Syifa, 1986.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

- AS-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 14, Cet 9, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Asaf A.A Fyzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam II*, Jakarta: Tinta Mas, 1966.
- A.W.Munawir, *Kamus Al-Munawir*, Cet.14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Azwar, Saiffudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Boedi Harsono, *Hukum Agrarian Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta: Djambatan, 2007.
- Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Ce.1, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Efendi, Joenaedi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Efendi, Satria, *Problematisa Hukum keluarga Islam Kontemporer*, Cet.III, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hendi Suhendi, *Fiqih muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hadi Mulyo dan Shobahussurur, *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: CvAsySyifa, 1992.
- Herryanto Al-Fandi, *Etika Bermuamalah Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Hilmi karim, *fiqih muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo persada, 2002).
- Huda, Nurul, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Ibnu Rusyid, *Bidayah Al-Mujtahid*, Jilid II 245
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulugh Al Maram Min Adillat Al Ahkam*, Semarang: Taha Putera, t.th.
- Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Imam Nawawi, *HadisArba'in Nawawi*, Terjemahan Abdul Murhaimin As'ad, Surabaya: Ar-Rohman, TT.

- Imam Malik Bin Anas, *Kitab Al-Musnad*, Kairo Mesir: Darul Hadis, 1995.
- Kasuwi Saiban, *Hukum Waris Islam*, Malang: Um Press, 2007.
- M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet.1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, Edisi ke-1, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Salim, *Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman dan Hibah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Siumanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2000).
- Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*, Cet.ke-II, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Subekti, R, Tjitrosudibio,R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Subekti R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung: PT. Internusa, 1994.
- Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS, 2006.
- Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Semarang: Pustaka Alawiyah, t.th.
- Pantja Astawa, I.Gede, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: PT.Alumni, 2008.
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2007.
- Teungku Muhammad Hasbie Ash-Shiddieqh, *Pengantar Fqih Muamalah*, Cet.4, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Tri Jaya Pramesti, *Prosedur Hibah Tanah dan bangunan kepada Keluarga*, 23 September 2013,  
<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lthle582blad14c/prosedur-hibah-tanah-dan-bangunan-kepada-keluarga>
- Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

#### Jurnal

An-Nida, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.40, No.2 Juli – Agustus 2015 Tersedia di <http://ejournal.uin.suska.ac.id/index.php/anida> (Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2020 Pukul 11.43 WIB).

Azni, “Eksistensi Hibah Dan Posibilitas Pembatalannya dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.40, h.4, No.2 Juli – Agustus 2015, Tersedia di <https://www.google.com/search?q=jurnal+tentang+hibah&oq=jurnal+tentang+hibah&aqs=Chrome..69i57j017.4464j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> (Diakses Pada Tanggal 12 Februari 2020 pukul 08.00 WIB)

